

ISI

Inisiatif Damai>>>>1-2

Politik Aceh Dibelah, Indonesia Siapkan
Plan B>>>>3-4

Politik : Laporan HRW dan Reputasi
Susilo >>>5-6

HAM : Laporan HRW dan Laporan
Amnesty>>> 6-7

Senat A.S Halang Bantuan Militer untuk
Indonesia>>>>8

Kampanye : Penang dan Hanoi>>>>9

Opini : Self Determination >>>10-13

Aceh Berduka: Ishak Daud dan Munir
Meninggal>>>> 14-15

Biografi Merdeka >>>16

DUTA ACHEH

suara aceh di negeri seberang

◆ Edisi II/ 2004



Perundingan di Tokyo yang di fasilitasi kuartet Amerika, Jepang, Uni Eropa dan Bank Dunia. **Kalah dengan kelompok garis keras Indonesia**

INISIATIF DAMAI DARI KWARTET, AKANKAH DIALOG DIBUKA LAGI?

Bak gendang bersambut tiba-tiba suara-suara untuk mengembalikan proses damai di Aceh mulai bersahutan dalam sebulan terakhir. Mula-mula suara gendang itu terdengar di gedung parlemen Amerika, kemudian disambut oleh diplomat Jepang dan seterusnya Susilo Bambang Yudhoyono yang menggantikan rezim Megawati menabuhkan nada yang sama. Akankan pintu dialog yang sudah setahun setengah ditutup di Aceh dibuka kembali? Ataukah kelompok garis keras yang terus melantunkan lagu perang yang akhirnya menguasai irama dalam konflik di Aceh?

Adalah B. Lynn Pascoe diplomat senior yang telah mengabdikan 37 tahun umurnya untuk urusan luar negeri Amerika yang mula-mula mencuatkan pentingnya proses damai kembali dibuka di Aceh. Pascoe yang segera menggantikan posisi Ralph L. Boyce untuk jabatan duta besar di Indonesia melontarkan bahwa penugasan utamanya di Indonesia adalah memfasilitasi proses damai di Aceh. Ungkapan itu disampaikan dalam pertemuan dengan para senator Amerika awal September lalu. Di depan wakil-wakil negara bagian Amerika, Pascoe yang pernah bertugas di China, Thailand dan terakhir di Malaysia itu yakin negaranya mampu membantu untuk memfasilitasi perdamaian di Aceh. Pascoe juga menyebutkan pergantian status Darurat Militer (DM) kepada Darurat Sipil (DS) tidak banyak memberi perubahan keadaan di Aceh.

Setelah negara Paman Sam, pejabat Jepang pula buka suara. Negara matahari terbit yang sejak awal tidak setuju dengan pendekatan militer yang dilakukan Indonesia kembali menyuarakan pendiriannya. Akhir September lalu dalam kunjungannya ke Aceh, Konsul Jepang Hiroharu Hashi menyatakan harapannya agar konflik di Aceh dapat diselesaikan dengan cara damai. Hiroharu juga menegaskan bahwa pemerintahnya selama ini terus mendukung agar upaya-upaya mewujudkan perdamaian di Aceh.

Usaha-usaha untuk membuka kembali proses damai di Aceh, juga terlihat dilakukan oleh Uni Eropa yang saat ini presidennya dipegang oleh negara Belanda. Bulan lalu, kedutaan negara itu di Jakarta mencoba menggagas pertemuan dengan pemerintahan sipil dan kalangan NGO di Aceh untuk melihat peluang-peluang mewujudkan perdamaian di Aceh. Namun kerana tidak ada izin dari Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) maka pertemuan itu dibatalkan.

Usaha-usaha yang dilakukan Amerika, Jepang dan Uni Eropa ini menimbulkan spekulasi akan dibukanya kembali perundingan di Aceh. Bagaimana tidak, negara-negara itu ditambah dengan Bank Dunia digelar sebagai kuartet yang pernah memfasilitasi perundingan RI-GAM di Tokyo tahun lepas. Apalagi inisiatif ini dimunculkan menjelang wujudnya pemerintahan baru di Indonesia dan berakhirnya darurat sipil di Aceh. Spekulasi ini semakin kuat setelah Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih sebagai presiden baru Indonesia juga melontarkan nada yang serupa. "Konflik di Aceh harus diselesaikan secara adil dan dengan cara yang paling damai" kata mantan Jendral itu selepas dipastikan memenangkan kursi nomor satu di Indonesia.

Sementara pihak pejuang Aceh, melalui juru bicara GAM di Swedia, Bakhtiar Abdullah kembali menegaskan

komitmennya untuk menempuh cara-cara damai dan beradab dalam penyelesaian konflik dengan Indonesia. Tentunya untuk memulai dialog, Indonesia harus menghentikan peperangan yang dilancarkan dengan Aceh "Bagaimana dialog boleh berjalan sementara perang masih berlangsung? Bagaimana Anda bicara tentang perdamaian dan disaat yang sama pergi berperang?" kata Bakhtiar Abdullah kepada kantor berita AP minggu lalu.

Selain karena adanya pemerintahan baru, momentum untuk menyuarkan kembali perdamaian di Aceh juga didukung oleh kegagalan pendekatan militer yang telah dijalankan Indonesia. Dikalangan kelompok moderat Indonesia sudah muncul anggapan bahwa militer Indonesia yang telah diberi kesempatan yang sangat besar untuk menyelesaikan konflik Aceh ternyata kembali menunjukkan kegagalan. Kalangan DPR di Indonesia mulai memunculkan wacana untuk menghentikan status darurat sipil di Aceh. "Jika darurat sipil tidak dituntaskan, kondisi Aceh tidak pernah normal" kata Mawardi Abdullah anggota tim pemantau Aceh di DPR RI.

Namun usaha-usaha untuk mengembalikan pendekatan non kekerasan dalam penyelesaian konflik Aceh tentu akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tetap menginginkan Aceh berada dalam kekuasaan militer. Awal-awal lagi Irjend Bachrumsyah sebagai penguasa darurat sipil

daerah telah meminta perpanjangan status darurat di Aceh. Kapolda Aceh ini berargumen masih ada 2.000 anggota GAM dengan 900 pucuk senjata yang harus diburu. Padahal sebelumnya PDSJ juga mengumumkan telah melumpuhkan lebih 6.500 anggota GAM, baik dibunuh, ditangkap atau menyerah. Dan semua orang masih ingat bahwa sebelum DM Mai 2003 lalu, pihak militer menyatakan GAM yang harus ditumpas di Aceh berjumlah 5.000 orang.

Bagi militer dan kelompok garis keras Indonesia yang tetap menginginkan pertumpahan darah di Aceh segala cara boleh dihalalkan agar tujuannya tercapai. Selain itu mereka memiliki strategi, pengalaman dan kekuasaannya yang sangat besar di Indonesia. Sehingga bukan perkara mudah untuk membuka kembali dialog di Aceh, meski inisiatif ini datangnya dari kwartet yang kekuatannya mendominasi politik dan ekonomi dunia.

Selain itu, rakyat Aceh pun harus selalu ingat bahwa inisiatif pihak dari luar itu belum tentu seirama dengan aspirasi yang paling mendasar rakyat Aceh yakni kemerdekaan. Sehingga rakyat Aceh perlu senantiasa menggagas agenda, inisiatif dan strategi sendiri agar cita-cita politiknya dapat tercapai. Dan juga harus jeli mengambil keuntungan dari agenda-agenda yang dijalankan pihak luar, baik kwartet, kelompok moderat bahkan kelompok garis keras di Indonesia. Semoga.

aspirasi

HENTIKAN PEMBANTAIAAN SIPIL AGAR TAK ADA LAGI ACHEH PUNGO

Keganasan dan pembantaian terhadap rakyat sipil terus berlaku di wilayah-wilayah Aceh yang kini masih terus bergolak. Sejak berlakunya Darurat Militer 19 Mei 2003 hingga bertukar status setahun kemudian menjadi Darurat Sipil lebih 2000 rakyat sipil terkorban dalam pembantaian atau boleh dikatakan penghapusan etnik baik yang dilakukan oleh TNI maupun POLRI. Walaupun pemerintah Indonesia terus menafikan tindakan TNI/POLRI dalam pembunuhan rakyat sipil, namun bukti-bukti di lapangan merekah yang membunuh rakyat sipil Aceh dan sangat sedikit dari yang menjadi korban di Aceh yang merupakan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Peristiwa terbaru adalah penembakan terhadap Razali Husen (40). Lelaki ini tewas pada tanggal 16 September 2004 di Kampong Panteerheng Samalanga Aceh Jeumpa yang dilakukan oleh TNI dari Korps Marinir. Razali Husen adalah seorang nelayan, yang sehari-hari turun ke laut untuk memancing ikan. Dia telah 20 tahun menjalani profesinya. Namun takdir menjemputnya lebih cepat, pada hari naas itu pukul 5 pagi tubuhnya tersungkur di dalam sampannya, akibat di terjang 3 biji timah panas di dadanya dari senapan serdadu Indonesia.

Kini Razali telah menghadap Ilahi Rabbi dengan meninggalkan isteri dan tujuh orang anaknya yang masih kecil. Namun kesedihan dan tangisan bukan saja terdengar dari keluarga Razali, tetapi seluruh rakyat Aceh masih terus menangis, bahkan tak pernah berhenti menangis. Namun sayangnya, tangisan mereka tidak ada lagi yang mendengar. Hanya mereka yang kehilangan suami, anak dan juga saudara mara-nya yang berusaha membendung kepiluan yang dialaminya. Sementara manusia-manusia yang selalu menjulang dan melaungkan Hak Asasi Manusia (HAM) terus membisu seribu bahasa seakan tidak ada apa yang berlaku di Bumi Serambi Mekkah. Dan tidak ada lagi keadilan dunia yang sering memperjuangkan hak-hak masyarakat Pribumi yang seakan hilang di telan oleh sang penjajah.

Sejak setengah abad penjajahan Indonesia keatas Aceh, telah banyak rakyat yang menjadi korban kekejaman serdadu-serdadu Indonesia dalam operasi-operasinya memburu pejuang-pejuang kemerdekaan. TNI juga telah menjadikan masyarakat sipil Aceh sebagai perisai dalam operasi ketentaraan mereka yang sangat bertentangan dengan undang-undang antarbangsa. Kesan konflik ini juga berlaku kaum wanita. Ramai dari mereka yang harus menerima tekanan mental akibat dari perlecehan seksual dan pemerkosaan yang

di lakukan oleh TNI/POLRI. Selain itu tidak kurang juga pemuda-pemuda Aceh yang mengalami stres dan hilang ingatan akibat penganiayaan oleh TNI/POLRI. Kini lebih 200 orang sakit jiwa di Hospital Zainal Abidin Banda Aceh. Ini semua akibat penganiayaan dan juga akibat trauma kerana yang disebabkan suami, anak, dan saudara mara di bunuh di depan mata.

Namun sebegitu penderitaan yang harus dialami, sampai hari ini nasib bangsa Aceh belum lagi terbelas sebagaimana bangsa-bangsa lain yang tertindas. Tangisan dan jeritan-jeritan yang tidak lagi bersuara masih lagi terkurung, tergantung dalam tembok-tembok penyiksaan yang di miliki oleh TNI/POLRI, tak ubah seperti penjara-penjara yang dimiliki oleh PolPot semasa perang Vietnam dulu dalam pembantaian rakyat nya sendiri.

Kini bangsa Aceh telah menjadi pelarian dari negara nya sendiri, dan tidak kurang juga yang menjadi hamba kepada penjajah. Mereka-mereka yang masih bersemangat untuk bertahan dengan perjuangannya harus hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan dalam mencapai cita-citanya.

Akhirnya, hal yang paling utama yang ingin saya sampaikan adalah mencari jalan untuk menyelesaikan konflik Aceh dengan jalan kembali kemeja perundingan. Ini agar tidak ada lagi pembantaian terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa, serta mengurangkan orang-orang Aceh menjadi gila, supaya tidak ada lagi gelaran "Aceh Pungo".

MUZAKKIR SLG

SUARAKAN ASPIRASI ANDA

Kolom aspirasi ini terbuka untuk seluruh pembaca yang ingin menyuarkan aspirasi, ide-ide dan gagasan berkenaan dengan perjuangan pembebasan Bangsa Aceh dari penjajahan Indonesia. Tulisan boleh dalam bahasa Aceh, Melayu dan Inggris dan tidak mesti diketik. Tulisan dapat dikirimkan kepada e-mail duta_aceh@yahoo.com atau melalui distributor-distributor Duta Aceh edisi cetak yang berdekatan dengan anda. Redaksi berhak melakukan editing untuk perbaikan bahasa



Demo meminta pembentukan "propinsi" Aceh Leuser Antara, di Jakarta September lalu. *Terjebak Skenario Indonesia*

ACHEH DI BAGI TIGA, INDONESIA SIAPKAN *PLAN B*

Tuntutan pembentukan dua "propinsi" baru di Aceh belakangan ini semakin marak disuarakan, baik melibatkan massa yang berdemonstrasi maupun lobi-lobi yang dilakukan para elit lokal. Kedua "propinsi" yang direncanakan itu adalah Leuser Antara, yang meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil dan satu lagi "propinsi" Aceh Barat Selatan yang meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Simeulue, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil.

Di Leuser Antara, usaha mewujudkan "propinsi" baru sudah terdengar sejak tahun 2001 sedangkan Aceh Barat Selatan cetuskan di Meulaboh pada April 2003 dalam pertemuan elit masyarakat dari wilayah-wilayah calon "propinsi" baru itu. Bagi pemerintah Indonesia aspirasi ini bak gayung bersambut. Karena bagi Indonesia ide ini memang bagian dari strategi mereka untuk mereduksi perlawanan di Aceh. Menurut Ketua Adnin Foundation Aceh, Hasanuddin Yusuf usaha pemecahan Aceh itu adalah upaya-upaya Indonesia untuk menghilangkan rasa patriotisme dan fanatisme ke-Achhe-an yang selama ini menjadi duri dalam daging bagi RI. Hasanuddin yang juga mahasiswa program doktor di Universitas Malaysia Sabah (UMS) usaha pembelahan Aceh memiliki tujuan yang sama dengan program pertukaran pemuda Jawa dengan Aceh, proyek transmigrasi, bahkan sama dengan DOM dan darurat militer serta darurat sipil. "Indonesia ingin Aceh secara keseluruhan betul-betul membumi dengannya sehingga berbagai upaya yang halal, syubhat maupun haram dilakukan" tegas Hasanuddin.

Lebih jelas lagi, Teuku Kemal Fasya, Dosen Unima Lhokseumawe menyatakan bahwa memang Badan Intelijen Negara (BIN) telah melakukan riset kemiliteran tentang ide membelah Aceh dan juga Papua untuk melemahkan perlawanan di kedua wilayah tersebut. "Sejak tahun 1999 konsep pemekaran ini sudah menjadi *proposal project* yang detail di BIN" urai Kemal dalam sebuah artikelnya yang diterbitkan Acehkita.com bulan lalu.

Di Papua usaha ini sudah lebih maju. BIN dilaporkan mendesak Megawati untuk segera mengeluarkan Inpres untuk membagi Papua. Padahal pihak DPR Indonesia telah mengesahkan UU Otonomi Khusus untuk Papua yang salah satu point-nya menyebutkan setiap pemekaran wilayah di Papua harus dengan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun belum lagi lembaga perwakilan rakyat Papua itu dibentuk, wilayah itu sudah dibagi empat. Januari 2003 Megawati, yang harus menyerahkan kursi ke-presidenannya kepada Yudhoyono, menekan Inpres yang membelah Papua menjadi empat yakni propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Irian Jaya, dan Papua. Bagi inteleijen Indonesia

membagi Papua memang sudah mendesak. Mereka telah mencium keterlibatan negara luar, terutama Australia dalam konflik di Papua. "Seorang Jenderal yang menjadi komandan Interfet di East Timor, sekarang mengepapali desk Papua di Australia. Tentu kami tidak ingin Papua terlepas" demikian penuturan seorang sumber di Dephankam RI seperti dikutip Papua Post, Februari 2003 lalu. Episode pemekaran Papua ini juga dikhabarkan berimbas kepada Sidney John. Diberitakan pengusiran aktivis International Crisis Group (ICG) dari Indonesia dua bulan lalu ini terkait dengan laporannya tentang keterlibatan BIN dalam memekaran propinsi di Papua.

Modus membagi wilayah ini juga dilakukan di Riau, Bangsa Melayu yang pernah mencetuskan ide merdeka dari Indonesia ini juga harus mengalami nasib yang sama. Belum lagi sempat gerakan Riau Merdeka yang dicitus Prof Tabrani Rab memperkuat diri, akhir Februari lalu wilayah Riau telahpun dibelah dua; propinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Untuk Aceh sebagai sebuah wilayah terus memberikan perlawanan sejak terbentuk Indonesia politik pecah belah tentu semakin penting. Selain untuk melokalisir kekuatan perlawanan, strategi ini untuk jangka panjang merupakan *plan B* bagi Indonesia. Artinya walaupun suatu saat Indonesia tidak berhasil mempertahankan seluruh wilayah Aceh, setidaknya wilayah-wilayah yang telah dikeluarkan dari wilayah utama Aceh akan sanggup dikekalkan dalam wilayah Indonesia. Karena pemisahan administrasi pemerintahan merupakan awal dari upaya pemisahan identitas yang pada akhirnya, rakyat di wilayah "propinsi" baru tidak lagi merasa bagian dari Aceh tidak akan merasa memiliki perjuangan dan perasaan yang sama dengan rakyat Aceh. Apalagi harus diakui bahwa perlawanan yang ditunjukkan di wilayah-wilayah itu tidak sekuat perlawanan di wilayah-wilayah yang akan kekal dalam "propinsi" NAD.

Kalau ini terjadi, maka Bangsa Aceh akan mundur kembali 500 tahun ke belakang. Pada masa itu, wilayah Aceh sekarang hanya merupakan beberapa kerajaan kecil, yakni Aru, Lamuri, Pedir, Perelak, Nakur, Benua (Tamiang), Jaya, Linge, Daya, Samudera dan Pasai. Baru pada abad awal abad ke 16, Sultan Mugayat Shah menggabungkan kerajaan-kerajaan itu, yang kemudian menjadi kerajaan yang disegani di Selat Malaka. Kerajaan Aceh semakin kuat pada abad ke 17, sebagian kerajaan di Sumatera dan Semenanjung Malaya masuk dalam konfederasi Aceh, termasuk Palembang, Padang, Deli, Pahang, Perak, Johor dan Kedah.

Sejarah menyaksikan kerajaan-kerajaan taklukan itu masuk dan keluar dari kekuasaan Aceh. Yang menjadi catatan adalah wilayah-wilayah Aceh yakni wilayah yang mula-mula disatukan oleh Mugayat Shah merupakan wilayah yang terus berada dalam sebuah ikatan, baik secara territorial maupun emosial. Bahkan perjalanan Aceh menghadapi tekanan yang hebat saat perang dengan Belanda, kesatuan wilayah ini tetap terjaga dan rakyatnya bahu membahu menghadapi agresi asing tersebut.

Hari ini bayang-bayang tercerai berainya sebuah komunitas Bangsa yang telah terbentuk 5 abad lalu itu semakin nyata didepan mata. Dan ini terjadi hanya karena kerena kepentingan beberapa elit yang ingin memperbesar kekuasaannya yang bekerjasama dengan penjajah yang ingin semakin leluasa menngontrol tanah jajahannya. Kalau episode buruk dalam sejarah Aceh ini menjadi kenyataan, maka para pejuang kemerdekaan harus mengakui bahwa taktik penjajahan Indonesia lebih cerdik dari Belanda. Karena 70 tahun Belanda di Aceh tak sampai mampu membelah teritori Aceh yang telah diwariskan Mugayat Shah diawal abad ke 16 lalu. Dan agaknya kita harus segera mempersiapkan *plan B* sebelum pemisahan teritori itu berlanjut dengan pemisahan identitas.

"Sejak tahun 1999 konsep pemekaran ini sudah menjadi *proposal project* yang detail di BIN"

“PROPINSI” BARU TERBENTUK RAKYAT KECIL SEMAKIN MISKIN

Usaha untuk menambah dua “propinsi” di Aceh semakin hari semakin pasti. Pada tanggal 28 September lalu DPR RI melakukan sidang pleno dan telahpun bersetuju untuk dilakukan pembahasan usulan pembentukan “propinsi” Aceh Leuser Antara (ALA). Sedangkan “propinsi” Aceh Barat Selatan telah pula mendapat lampu hijau dari Hari Subarno, Menteri Dalam Negari (Mendagri) Indonesia. Hal ini seperti diungkapkan Tjut Agam, ketua Panitia Pembentukan “Propinsi” Aceh Barat Selatan kepada media baru-baru ini.

Pembentukan “propinsi” baru di Aceh dirancang dengan memanfaatkan elite-elite politik lokal yang haus kekuasaan dan tokoh-tokoh daerah tersebut yang ada di Jakarta. Selain lobi-lobi dan berbagai pertemuan, sejumlah demonstrasi dan aksi massa telah dilakukan.

Akhir Agustus lalu ratusan masyarakat dari Forum Gayo Singkil (FORGAS) yang ada di Jakarta melakukan unjuk rasa ke Gedung MPR. Kemudian baru-baru, seratusan mahasiswa yang berasal dari Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Tengah dan Bener Meriah yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Leuser Antara (AMLA) bersama dengan FBLMA (Forum Bersama Masyarakat Leuser Antara) dilaporkan melakukan unjuk rasa dengan menduduki kantor perwakilan Pemda NAD di Jakarta. Aksi ini dilanjutkan di gedung DPR RI pada 28 September 2004 ketika anggota dewan bersidang untuk memutuskan perlu tidaknya usulan pembentukan “propinsi” ALA dibahas. Aksi-aksi dan berbagai lobi-lobi ini membuat konsep pemecahan Aceh ini bergulir dengan cepat.

Bagi pembenarannya, para pengagasnya menyatakan ide pembentukan provinsi baru ini adalah untuk memacu ekonomi dan kesejahteraan rakyat di wilayah propinsi baru nanti. Selain itu mereka juga berargumen bahwa selama dalam propinsi Aceh, rakyat diwilayah-wilayah itu terus dimarginalkan. Isu marginalisasi, kurang perhatian dan lambatnya pembangunan selama berada dalam propinsi Aceh ini digunakan untuk memobilisasi rakyat untuk mendukung ide ini. Padahal menurut Hasanuddin Yusuf sumber ketidakadilan berasal dari pemerintah Indonesia yang cenderung sentralistik. “Sistem dan operasional pemerintah Indonesia sampai hari ini belum lagi memihak kepada rakyat kecil dan wilayah terpencil” kata Hasanuddin.

Apa yang dikatakan Hasanuddin ini sulit untuk dibantah, contoh dekat adalah kawasan Lhokweumawe dan Aceh Utara yang meskipun merupakan wilayah sumber utama devisa dan pendapatan daerah, namun wilayah itu juga sebagai daerah yang paling banyak desa miskinnya di Aceh dan dengan kasat mata kita boleh lihat rendahnya taraf ekonomi rakyat disekeliling industri-industri raksasa yang ada disana.

Harapan rakyat akan lebih makmur dengan “propinsi” baru juga ditepis Lukman Hakim peneliti dari Center for Development Studies (CDS). Menurutnya justru rakyat di “propinsi” baru nanti akan merasakan kerugian dari segi ekonomi. Karena selama ini dana pemasukan dan roda pembangunan diwilayah itu digerakkan oleh pembagian hasil kekayaan yang sebagian besar berasal dari wilayah Aceh Utara dan Timur. Dengan pemisahan diri menjadi propinsi baru maka wilayah-wilayah itu tidak akan memperoleh cipratan rezeki dari wilayah kaya di Aceh. Sehingga, seperti ditutur Lukman dalam artikelnya di Serambi Indonesia, pemasukan “propinsi” baru nantinya akan

bersandar dari pusat yang jumlahnya lebih kecil. Dan sialnya, sebagian besar pemasukan itu akan digunakan untuk kepentingan elite yakni eksekutif dan legislatif dalam bentuk dana rutin. Dana rutin ini termasuk membiayai tunjangan jabatan, kenderaan operasional kepala daerah, DPRD dan Dinas, juga untuk membangun gedung baru pimpinan daerah.

Dana rutin ini, menurut Lukman setiap tahunnya bisa mencapai 60% hingga 70%. Sehingga rakyat hanya akan memperoleh 30-40% dari dana pembangunan yang membuat dana perkapita penduduk akan sangat kecil dibandingkan dana pejabat dan pegawai negeri yang diterima melalui dana rutin. “Artinya rakyat akan lebih terpinggirkan dan miskin keadaannya daripada keadaan saat ini hidup dalam satu propinsi” tegas Lukman yang juga dosen di Fakultas Ekonomi Unsyiah itu.

Lukman juga mengingatkan bahwa kesiapan wilayah-wilayah itu untuk menjadi sebuah “propinsi” sangat menyangsikan. “Kalau mau jujur”, kata lelaki bertubuh gempal itu, “potensi ekonomi wilayah-wilayah tersebut sangatlah kecil. Buktinya, sumbangan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) kabupaten atau kota dari wilayah itu terhadap “propinsi” NAD hanya dibawah 25% pada tahun 2003”.

Dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih merisaukan lagi, menurut Lukman, kalau digabungkan—misalnya—ke lima “kabupaten” calon “propinsi” ALA maka PAD-nya maka jumlahnya sekitar cuma Rp 6 milyar atau hanya setara dengan PAD Kotamadya Banda Aceh. Dengan keterbatasan ini dikhawatirkan “propinsi” baru nantinya sangat bergantung kepada dana rutin yang berasal dari pusat, yang sudah kita ketahui sebagian besar akan masuk ke kantong elit birokrat dan politik lokal. Sedangkan rakyat banyak semakin bergelimang dengan ketertinggalan dan yang lebih menyakitkan kehilangan semangat untuk mekespersikan perlawanan terhadap penindasan.

Lukman Hakim yang melihat tidak adanya alasan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dalam pembentukan “propinsi” baru, diakhir tulisannya menyebutkan “Jadi pemekaran wilayah lebih cenderung sebagai perilaku politik *divide et ampere* yang pernah diterapkan kolonial Belanda ketika menjajah Indonesia.” Semoga kita lebih cermat.

*) Sebagai media pembebasan Aceh, redaksi tidak mengakui penyebutan propinsi untuk wilayah Aceh. Sehingga dalam setiap kata propinsi/kabupaten redaksi meletakkan koma dua diatas (“)



LAPORAN HRW DAN REPUTASI SUSILO



Tanpa banyak diketahui ramai orang, Human Right Watch (HRW) awal tahun ini mengirimkan tim investasinya ke Jawa Tengah, Indonesia. Kasus HAM apa yang berlaku di Jawa Tengah, sehingga NGO HAM tersohor yang bermarkas di New York harus datang kesana? Jawabannya baru diketahui publik setelah September lalu lembaga itu mengeluarkan laporan setebal 50 halaman yang isinya tentang kekerasan yang dilakukan aparat Indonesia terhadap tahanan-tahanan Aceh.

Lalu hubungannya dengan tim yang dikirim ke Jawa Tengah? Ternyata ini taktik HRW untuk memperoleh data setelah Indonesia membatasi aktivis HAM internasional masuk ke Aceh. Di Jawa Tengah aktivis HRW berkunjung ke lima penjara yang ada disana dan mewawancarai 35 orang tahanan Aceh yang dibuang ke-sana. HRW yang telah

berkali-kali mengeluarkan laporan tentang Aceh juga melakukan taktik yang sama ketika menerbitkan laporan diawal pemberlakuan Darurat Militer (DM).

Pada masa itu situasinya lebih ketat, semua saluran

informasi dari Aceh dikuasai militer, orang asing apalagi NGO dilarang masuk ke Aceh. Koran dan media massa yang menulis tentang Aceh juga terjebak untuk melaporkan propaganda militer. Akibatnya laporan yang independen tentang bagaimana keadaan di Aceh sangat susah didapat pada waktu itu. Tak kehabisan akal, HRW mengirimkan dua aktivisnya ke Malaysia. Gelombang pengungsian rakyat Aceh pada masa itu, membuat mereka dengan menemukan 85 orang yang baru tiba dan bersedia diwawancarai. Tak lama kemudian terbitlah laporan yang berjudul "Aceh under Martial Law : Inside the Secret War" (Aceh di Bawah Darurat Militer: di Dalam Perang Rahasia). Laporan yang menceritakan suasana kepahitan yang dialami rakyat Aceh selama pemberlakuan DM itu membuat gerah pejabat Indonesia. Mulai dari Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda sampai Koordinator Menkopolkam kala itu Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan protesnya.

Laporan HRW kali inipun segera mendapat reaksi dari pejabat militer

Indonesia. Cuma respon kali ini sangat bertolak belakang dengan respon yang diberikan Indonesia terhadap laporan-laporan HRW sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, sehari setelah dipublikasikan Mabes TNI segera membentuk tim yang langsung dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Kapuspom) Mayjen TNI Rucyan dan dibantu oleh Mayjen TNI FX Sukirman, Kepala Badan Pembina Hukum Puspom TNI. Tim itu dibentuk untuk menyelidiki kebenaran laporan HRW itu. "Bila laporan itu benar kami akan mengambil tindakan yang tegas, tapi bila tak terbukti kami akan menempuh jalur hukum terhadap LSM itu" demikian kata Mayjen Sjafrie Syamsuddin, Kepala Pusat Penerangan TNI.

Hal ini ditambah lagi dengan pernyataan juri bicara Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDS) Letnan Kolonel Yani Basuki yang menyatakan bahwa Aceh terbuka bagi pekerja kemanusiaan dari Indonesia ataupun asing untuk berkunjung ke Aceh.

Seorang pengamat Aceh menganggap respon positif dari militer itu sangat tergantung dengan kondisi politik Indonesia saat laporan itu dikeluarkan. sebagaimana yang kita ketahui laporan HRW ini dikeluarkan disaat kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertarungan memperebutkan kursi kepresidenan sudah ditangan. Dan Susilo yang selama ini tampil sebagai militer reformis bagi publik Indonesia tentu harus bertindak cantik menyikapi laporan seperti ini.

"Kita tahu militer mendukung SBY, tentu mereka tidak mau jika belum apa image Susilo jatuh hanya karena mereka membantah laporan yang publik tahu bahwa itu adalah benar" kata pengamat yang aktif disebuah lembaga kajian di Jakarta itu. Apalagi Susilo awalnya sudah menyatakan akan menyelesaikan konflik Aceh secara damai.

Sebenarnya bukan hanya kepada publik Indonesia Susilo harus menjaga reputasinya sebelum dia memegang jabatan tertinggi di negara itu. Perancang darurat militer di Aceh ini juga harus mempertimbangkan kemanuan kekuatan-kekuatan negara asing terutama Amerika agar naiknya menjadi presiden berjalan mulus. Dan yang membuat Susilo dan pendukungnya harus hati-hati, laporan HRW kali bukan hanya mengutip testimony korban, tapi juga

pendapat
pendapat
diplomasi

yang sangat berpengaruh dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Misalnya pada halaman delapan dikutip pernyataan Matthew Daley, wakil sekretaris Amerika untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, yang menyatakan "Aceh adalah wilayah dengan tingkat krisis kemanusiaan yang paling serius di Asia Tenggara saat ini" atau pada bagian lain seorang pejabat kedutaan Amerika di Jakarta menyatakan "Saya sangat yakin tidak seorangpun dari mereka yang dihukum di Aceh menjalani proses hukum yang mengikuti standar internasional bahkan standar Indonesia. Saya secara terus menerus telah menyampaikan bahwa kebanyakan dari mereka dihukum tanpa saksi yang cukup, kebanyakan saksi hanyalah polisi atau militer yang kadang tidak hadir ke pengadilan."

Bukan hanya dari Amerika, beberapa diplomat dari negara Eropa dan PBB juga dijadikan dasar dalam penyusunan laporan HRW kali ini. Sehingga tentu saja militer Indonesia tidak seandainya saja merespon laporan ini, sudah pasti para diplomat itu akan terus mengamati gelagat negara ini dalam menyikapi laporan ini.

Namun terlepas dari apapun, bagi rakyat Aceh memberi kepercayaan kembali terhadap inisiatif Indonesia apalagi militernya adalah sebuah kemustahilan. Pengalaman dalam hubungan Aceh-Indonesia memberi banyak pelajaran bahwa selalu ada pengorbanan yang harus diberikan rakyat Aceh dalam setiap kepercayaan yang diberikan.

Cuma ada satu pelajaran yang dapat dipetik dari laporan HRW dan respon militer Indonesia ini yakni bahwa lembaga musuh utama rakyat Aceh itu semakin berhati-hati, semakin profesional dan dengan naiknya Susilo akan semakin berkuasa. Sehingga mau tidak mau rakyat Aceh dan terutama pejuang kemerdekaan harusnya lebih memperbaiki diri, lebih profesional dan lebih berdisiplin kalau memang ingin mengalahkan mereka. **



Human Right Watch : MENYIKSA TAHANAN, INDONESIA HARUS UNDANG SPESIAL REPORTER PBB

Berbeda dengan laporan sebelumnya, laporan HRW kali ini mendapat respon positif dari Jakarta. Sehari sepelas diterbitkan, Mabes TNI segera membentuk tim untuk menyelidiki kebenaran laporan tersebut. Meski ada spekulasi respon TNI ini sangat berkaitan dengan reputasi presiden baru Susilo Bambang Yudhoyono, namun tetap menarik untuk disimak apa sebenarnya isi laporan HRW kali ini.

Laporan kali ini menekankan tentang penyiksaan yang dilakukan aparat keamanan Indonesia terhadap para tahanan di Aceh. Menurut HRW pasukan keamanan Indonesia di Aceh secara sistematis melakukan penyiksaan terhadap para tahanan tersangka pendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pengakuan paksa para tahanan secara rutin diberikan sebagai dasar untuk dakwaan di dalam laporan yang gagal untuk memenuhi standar pengadilan yang adil di bawah hukum Indonesia dan Internasional.

Untuk itu Human Rights Watch meminta Indonesia untuk mengundang *Special Rapporteur* PBB untuk Penyiksaan dan Kekejaman, Perlakuan tidak manusiawi atau Merendahkan atau Hukuman (*Special Rapporteur on Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) dan *Special Rapporteur* PBB untuk Kemandirian Hakim dan Pengacara (*Special Rapporteur on the Independence of Judges and*

Lawyers) untuk menyelidiki dan melaporkan pernyataan-pernyataan tersebut dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang relevan kepada Pemerintah Indonesia mengenai bagaimana menghentikan penganiayaan semacam itu.

Selain itu kepada masyarakat internasional, khususnya yang disebut kwartet (Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Bank Dunia) diminta mendesakkan Indonesia untuk membuka Aceh untuk jurnalis independen nasional dan internasional, pekerja-pekerja hak asasi manusia, para diplomat dan pengamat.

Laporan HRW disusun berdasarkan wawancara dengan 35 orang dewasa dan anak-anak tahanan dari Aceh, yang ditahan di lima penjara di Jawa Tengah. Laporan setebal 55 halaman yang berjudul "Aceh at War: Torture, Ill-Treatment and Unfair Trials," itu menyebutkan penyiksaan rutin, termasuk penggunaan penyetruman, penyundutan dengan rokok, pemukulan, ancaman dan intimidasi terhadap para tahanan tersangka anggota atau pendukung Gerakan Aceh Merdeka.

Dalam laporan itu Human Rights Watch juga mencatat bahwa pejabat Indonesia telah mengkritik penyiksaan dan penganiayaan tahanan muslim oleh Amerika Serikat di penjara Abu Ghraib, Irak. Mei lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Indonesia) mengatakan, "Pemerintah Amerika Serikat tidak mempunyai otoritas moral untuk menilai atau bertindak sebagai hakim terhadap negara-negara lain, termasuk di Indonesia, mengenai hak asasi manusia, khususnya setelah skandal penganiayaan di penjara Abu Ghraib, Irak." Sementara, juru bicara untuk Kopassus, unit pasukan khusus militer Indonesia yang dikenal mempunyai reputasi buruk, mengatakan, "Perlakuan terhadap tahanan Irak jelas-jelas tidak manusiawi karena militer seharusnya mempunyai standar yang ketat mengenai bagaimana



menginterogasi tahanan secara benar." Pasukan Kopassus, di dalam laporan ini, diidentifikasi oleh sejumlah korban sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk penyiksaan dan pelanggaran lainnya.

"Indonesia memang benar mengkritik Amerika Serikat untuk apa yang terjadi di Abu Ghraib," ungkap Brad Adams, Direktur Eksekutif untuk Divisi Asia HRW dalam siaran persnya. "Tapi meluasnya penyiksaan terhadap tahanan di Aceh menunjukkan bahwa militer Indonesia melakukan jenis penganiayaan yang sama terhadap warga negara Indonesia"

Para tahanan menggambarkan penganiayaan yang mengerikan oleh pasukan keamanan Indonesia. Seorang laki-laki Aceh mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa ia telah ditahan oleh petugas Kopassus sewaktu operasi militer di desanya, 5 Juni 2003. Ia menggambarkan kejadiannya: Setelah saya ditangkap saya dibawa ke sebuah pos tidak resmi. Itu adalah tempat penyiksaan. Saat itu saya diinterogasi dan dianiaya. Mereka mengikat tangan dan menutup mata, dan memukuli badan saya berkali-kali, kemudian mereka menyetrum dengan listrik, hingga saya luka-luka memar.

HRW juga meminta Susilo Bambang Yudhoyono, calon pemerintah yang akan datang, seorang mantan jenderal Angkatan Darat Indonesia, untuk menanggapi pernyataan di laporan ini dengan cepat dan dalam sikap yang serius dan transparan.

Human Rights Watch meminta kepada pemerintah Indonesia dan militer untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk segera mengakhiri penyiksaan dan penganiayaan terhadap para tahanan. Pemerintah harus melakukan penyelidikan terhadap pernyataan-pernyataan mengenai penyiksaan dan pelanggaran lainnya. Petugas militer dan polisi harus melakukan penyelidikan ke dalam dan menghukum anggotanya yang terbukti atau membiarkan tindakan-tindakan semacam itu atau mereka yang telah terlibat atau lalai dalam membiarkan hal tersebut terjadi.

Adam juga menyebutkan bahwa penyiksaan, penangkapan yang sewenang-wenang dan pengadilan yang tidak adil tumbuh dengan subur di bawah perlindungan kerahasiaan. "Selama Aceh masih tetap tertutup untuk penyelidikan seksama yang independen, penganiayaan semacam ini kemungkinan akan terus berlanjut." kata Adam

Sejak kembali terbukanya konflik, Human Rights Watch telah menerbitkan serangkaian laporan mengenai perang di Aceh yang mendokumentasikan pelanggaran serius oleh militer Indonesia, termasuk pembunuhan-pembunuhan di luar hukum, orang hilang, penangkapan-penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan. Sebagaimana disebutkan dalam laporan ini, angkatan darat tampaknya mengincar orang-orang muda yang mereka percaya, bahkan tanpa bukti, menjadi anggota atau pendukung GAM.

"Meskipun pemimpin senior militer Indonesia secara terbuka telah berjanji pada diri sendiri untuk mengikuti hukum internasional dalam melaksanakan operasi militer mereka di Aceh, kelakuan dari pasukan keamanan Indonesia di lapangan menceritakan hal yang sama sekali berbeda," Adam berkata.

"Selama Aceh masih tetap tertutup untuk penyelidikan seksama yang independen, penganiayaan semacam ini kemungkinan akan terus berlanjut."



Amnesty Internasional : TAK SATU ASPEK KEHIDUPAN DI ACHEH YANG TERLEPAS DARI PELANGGARAN HAM

Awal bulan ini Amnesty Internasional kembali menerbitkan laporan tentang Aceh. Laporan yang berjudul "Operasi Militer yang Baru, Pola Lama Pelanggaran HAM di Aceh" menceritakan tentang penyiksaan, pembunuhan politik dan serangan bersenjata yang telah menghancurkan kehidupan di Aceh.

Dalam laporan itu lembaga HAM yang berkedudukan di Inggris itu menyatakan bahwa ketika wilayah-wilayah Indonesia lainnya merayakan pilihan raya presiden secara langsung untuk pertama kalinya, Aceh terus berkecamuk dalam huru-hara.

Menurut laporan yang dikeluarkan pada 7 Oktober itu, pembunuhan politik, penyiksaan, dan serangan-serangan bersenjata atas rumah-rumah rakyat dan kampung-kampung masih terus menghancurkan kehidupan di Aceh dan memaksa beratus-ratus orang melarikan diri.

"Pada dasarnya tidak ada satu aspek kehidupan di Aceh yang terlepas dari pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan di bawah undang-undang darurat militer dan kini di bawah darurat sipil" kata Kate Allen, Direktur Amnesty Internasional dalam siaran pers-nya.

Namun demikian, lanjut Allen, pelanggaran-pelanggaran yang begitu bersimaharajalela secara luas itu masih saja tetap tersembunyi dari pandangan dunia luar.

"Masyarakat biasa telah diseret ke dalam kancah konflik antara angkatan bersenjata Indonesia dan pihak pemisah. Rakyat di peras, dipaksa menjalankan tugas jagamalam dan menghadiri upacara-upacara menyatakan taat setia kepada negara" tegasnya. Dan barangsiapa menolak dituduh bersimpati dengan GAM dan ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh.

Seorang petani yang diwawancarai oleh Amnesty International mengambarkan bagaimana adiknya yang berumur 25 tahun bernama Ilhami, telah ditembak oleh serdadu Indonesia ketika sedang memotong rumput untuk lembunya pada bulan April 2004.

Seorang petani lainnya melaporkan melihat seorang belia berumur 16 tahun, Muliadi, yang sedang bekerja di sawah telah dipanggil oleh seorang serdadu. Muliadi coba melarikan diri, tetapi telah ditembak di kaki dan ditangkap. Keberadaannya kini tidak diketahui.

Menurut Amnesty mereka yang ditangkap oleh sebab-sebab politik sering disiksa untuk mendapatkan pengakuan sebagai anggota GAM.

Kasus lain yang dilaporkan Amnesty tentang seorang pemuda berusia 22 tahun yang melaporkan telah dipukul, dibakar, dan diinjak-injak oleh 30 serdadu, ditelanjarkan dan dipaksa melakukan sex-mulut dengan seorang tahanan lainnya, kemudian dipaksa berlari-lari tanpa kasut di atas

aspal panas hingga telapak kakinya lecuh.

Juga seorang pemilik kedai yang diwawancarai oleh Amnesty Internasional pada bulan Mei 2004 masih nampak berpuluh-puluh luka bakar di lengannya tiga bulan setelah dia ditangkap dan disiksa. Katanya dia dituduh sebagai intel GAM, setelah menolak memberi "wang rokok" kepada seorang anggota Polis Indonesia.

"Militer Indonesia tidak peduli sama sekali akan keselamatan warga sipil. Yang paling terancam adalah para pemuda kerana mereka dicurigai sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kami telah diberitahu tentang lelaki, perempuan dan kanak-kanak yang dipaksa ikut dalam operasi-operasi militer sebagai perisai hidup. Perempuan dewasa dan anak-anak dara telah diperkosa dan dikenakan kekerasan-kekerasan sex lainnya." Urai Allen seterusnya.

Status pemerintahan di Aceh telah diturunkan dari darurat militer ke darurat sipil dalam bulan Mei yang lalu, tetapi laporan-laporan penyiksaan berlanjutan terus. Beberapa ribu orang yang dicurigai sebagai anggota atau pendukung GAM telah ditahan dalam masa 16 bulan yang lalu. Beratus-ratus orang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara setelah melalui proses peradilan yang tidak adil - sering sekali berdasarkan pengakuan yang didapatkan dengan penyiksaan.

"Indonesia membanggakan diri dengan kemajuan yang dicapai dalam menuju ke arah sistem pemerintahan demokrasi, namun nasib bangsa Aceh tetap tidak berubah. Mereka hidup dalam sebuah kawasan konflik yang telah dilupakan dan menghadapi pelanggaran-pelanggaran dahsyat atas hak-hak asasi mereka setiap hari tanpa ada jalan untuk mendapatkan pertolongan." kata Allen.

Berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti itu, beratus-ratus orang Aceh telah melarikan diri ke Malaysia. Setibanya di negara tetangga itu mereka terpaksa pula menghadapi risiko ditangkap dan ditahan di pusat-pusat tahanan imigrasi yang sangat buruk keadaannya. Malaysia bahkan telah menghantar balik para pengungsi Aceh beberapa kali, walaupun undang-undang internasional melarang memulangkan orang-orang yang menghadapi pelanggaran serius atas hak-hak asasi mereka di negara sendiri.

Amnesty Internasional menggesa presiden baru Indonesia untuk menyatakan dengan terbuka dan jelas tentangannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia dan membentuk sebuah tim tingkat tinggi beranggotakan pakar-pakar yang bebas untuk mengadakan penyelidikan atas pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan di Aceh.

"Adalah sangat perlu juga agar supaya badan-badan hak-hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan - termasuk pakar-pakar PBB- supaya dibenarkan melawat Aceh." pinta Amnesty

Kepada negara-negara asing, Amnesty meminta untuk meningkatkan tekanan secara drastis atas Indonesia untuk membuka Aceh bagi amatan pakar-pakar hak asasi manusia, dan membenarkan badan-badan bantuan kemanusiaan untuk menjalankan khidmat mereka dan membawa mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia ke depan pengadilan.

Seorang pemuda berusia 22 tahun melaporkan telah dipukul, dibakar, dan diinjak-injak oleh 30 serdadu, ditelanjarkan dan dipaksa melakukan sex-mulut dengan seorang tahanan lainnya, kemudian dipaksa berlari-lari tanpa kasut di atas aspal panas hingga telapak kakinya lecuh.

SENAT A.S MENERUSKAN HALANGAN BANTUAN UNTUK MILITER INDONESIA

Senat Amerika Serikat pada 24 September 2004 lalu telah meluluskan pembaruan larangan bantuan untuk Indonesia di bawah program IMET (Latihan dan Pendidikan Militer Antarabangsa) dan FMF (Bantuan Dana Militer Asing). Senat dalam konstitusi Amerika merupakan salah satu dari dua badan yang ada di parlemen AS. Senat merupakan wakil dari negara-negara bagian. Sebuah badan lagi adalah kongres yang merupakan dewan perwakilan rakyat. Sebelum sesebuah rancangan undang-undang disahkan maka kedua badan perwakilan tersebut mesti meluluskannya.

Ketika meluluskan undang-undang Belanjawan Operasi Militer Luarnegeri, Senat setuju untuk meneruskan sekatan terhadap bantuan peralatan militer melalui pendanaan FMF dan pengeluaran lesen-lesen export untuk peralatan-peralatan perang. Selain itu, Senat juga meluaskan larangan untuk program IMET hingga State Department (Kementerian Luar Negeri) menentukan bahwa angkatan bersenjata dan pemerint-tah Indonesia telah memberi kerjasama penuh kepada FBI dalam menyelidikannya atas pembunuhan warganegara-warganegara AS di Papua Barat.

"Dilanjutkannya larangan program bantuan IMET dan FMF memberi tanda kepada pemerintah baru Indonesia bahwa Kongres berpendapat reformasi militer di Indonesia adalah vital bagi perkembangan

LATAR BELAKANG SEKATAN BANTUAN US TERHADAP MILITER INDONESIA

Kongres mula-mula sekali membuat hambatan bagi Indonesia untuk diberi bantuan di bawah program IMET, yang membawa perwira-perwira militer asing ke AS untuk menjalani latihan, sebagai reaksi terhadap pembantaian Santa Cruz yang terjadi pada 12 November, 1991. Dalam peristiwa itu lebih dari 270 penduduk awam di Timor Timur di bunuh oleh militer Indonesia. Semua hubungan militer dengan Indonesia diputuskan dalam bulan September 1999 ketika TNI dan grup-grup militia yang didukungnya membunuhanguskan Timor Timur.

Untuk tahun belanjawan 2004, Kongres melarang IMET bagi Indonesia setelah satu debat hangat dan meluluskan rancangan undang-undang itu dalam bulan Januari hingga State Department (Kementerian Luar Negeri) menentukan bahwa militer dan pemerintah Indonesia telah bersedia bekerjasama dengan FBI dalam

demokrasi di negara itu," kata John M. Miller, jurubicara ETAN (Jaringan Aksi untuk Timor Timur), yang telah berkampanye kuat dan terus menerus untuk mendapatkan larangan tersebut.

ETAN sedang mendesak Kongres untuk selanjutnya meluaskan larangan tersebut bagi bantuan latihan anti-teroris, yang pendanaannya diatur di bawah undang-undang yang berbeda. "Kongres haruslah mengenakan syarat-syarat yang sama ke atas program-program bantuan militer lainnya seperti yang dikenakan atas IMET dan FMF," kata Miller.

"Ramai anggota Kongres yang tidak puas hati dengan taraf kerjasama Indonesia dalam menyelesaikan penyelidikan atas serangan terhadap sebuah bus sekolah Amerika di Papua Barat tahun lalu," kata Karen Orenstein, Koordinator ETAN untuk Washington.

"Indonesia masih lagi belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi mendapatkan bantuan IMET, termasuk pertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran HAM di Timor Timur dan di Indonesia sendiri, serta transparansi dalam belanjawan militer. Bahkan, pihak militer terus saja secara sistematik melanggar hak-hak asasi manusia, terutama di Aceh dan di Papua Barat. Pembesarpembesar militer yang telah diputuskan mahkamah sebagai penjenayan kemanusiaan di Timor Timur masih terus saja memegang jabatan-jabatan tinggi dalam angkatan bersenjata Indonesia," katanya.

Rancangan undang-undang itu memperuntukkan US\$6 juta untuk Angkatan Laut Indonesia bagi program "keselamatan maritim" negara kepulauan itu. Peluncuran dana tersebut tertakluk pada pengesahan bahwa ALRI tidak "membuat pelanggaran serius hak-hak asasi manusia" dan bekerjasama dengan Unit Jenayah Besar PBB di Timor Timur, yang sedang menyelidiki tindakan-tindakan jenayah yang berlaku dalam tahun 1999 semasa referendum kemerdekaan Timor Timur dilaksanakan.

Versi Kongres bagi rancangan undang-undang yang telah diluluskan pada bulan Juli yang lalu itu, mengandungi syarat-syarat yang sama terhadap IMET dan melarang FMF sepenuhnya tanpa syarat.

Satu musyawarah komite bersama akan menyelaraskan perbezaan-perbezaan yang mungkin ada antara kedua versi rancangan undang-undang itu sebelum pengesahan akhir.**

penyelidikan terhadap serang hendap tahun 2002 itu. Pihak pemerintah Bush baru-baru ini telah mulai mendakwa bahwa syarat tersebut telah dipenuhi.

Walaupun seorang rakyat Papua Barat telah dinyatakan sebagai tertuduh oleh AS bagi pembunuhan-pembunuhan di Timika (Papua Barat) itu, sejumlah badan-badan Kongres berkeras bahwa syarat yang dikenakan atas IMET mesti diteruskan hingga investigasi pembantaian itu selesai sepenuhnya dan yang bertanggungjawab dibawa kedepan pengadilan. Indonesia masih belum lagi membawa seorangpun yang bertanggungjawab atas pembunuhan-pembunuhan tersebut ke pengadilan. TNI telah dinyatakan terlibat dalam serangan bulan Ogos 2002 atas guru-guru dan murid-murid sekolah Amerika di konsesi lumbung emas Freeport-McMoRan yang berpusat Louisiana itu. Dalam serangan tersebut dua orang warga Amerika dan seorang Indonesia terbunuh dan 11 orang lainnya, termasuk kanak-kanak berumur 6 tahun cedera kena tembak.

Syarat-syarat yang dikenakan Senat AS untuk membolehkan Indonesia mendapatkan bantuan FMF serupa dengan yang telah diluluskan oleh Kongres tahun lalu dan termasuk seruan supaya ada transparansi dalam belanjawan TNI dan pernyataan President AS bahwa angkatan bersenjata Indonesia "sudah tidak melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia," dan bahwa pemerintah Indonesia sedang membawa ke pengadilan anggota-anggota angkatan bersenjata negara itu yang diduga melakukan keganasan atau membantu grup-grup militia dan sedang menghukum mereka yang didapati bersalah melakukan hal-hal tersebut.

TNI mesti bekerjasama dengan Unit Jenayah Berat PBB di Timor-Timur yang dibentuk oleh Dewan Keamanan badan dunia itu, termasuk menyerahkan mereka yang terlibat untuk diadili oleh Mahkamah UN itu di Timor Timur. Lebih dari dua pertiga dari mereka yang dituduh terlibat



Bunga Perdamaian untuk Aceh

Menyambut hari perdamaian se-dunia, 9 September lalu, aktivis NGO bersama masyarakat Aceh di Penang melancarkan aksi bagi-bagi bunga kepada pengunjung pusat perbelanjaan di Komplek Tun Abdul Razak (Komtar) Penang. Aksi bagi punya yang membawa pesan bagi perdamaian di Aceh itu mendapat sambutan simpatik dari pengunjung Komtar. Banyak dari masyarakat Penang yang ingin tahu lebih lanjut tentang keadaan konflik di Aceh. Menurut beberapa pengunjung selama ini mereka lebih banyak mengerti tentang konflik di Irak dan Palestine berbanding konflik Aceh yang wilayahnya hanya terpisah sebuah selat dengan Malaysia. Selain bunga kepada pengunjung dibagikan brosur informasi tentang konflik Aceh dan sebuah kartu yang berjudul "Bunga Perdamaian untuk Aceh".

Dalam kartu itu berisi kalimat *"Di saat kita hidup dalam perdamaian, rakyat Aceh hidup dalam ketakutan. Lebih 4,000 orang Aceh terkorban tahun lalu tanpa ada perhatian simpati daripada masyarakat antarabangsa. Hari ini, 21 September 2004, pada hari Perdamaian Se-Dunia rakyat Aceh merayu kepada masyarakat antarabangsa, khususnya kepada rakyat Malaysia untuk menyedari penderitaan yang mereka alami sekarang dan membantu mereka mewujudkan perdamaian."* Diakhir kalimat disebutkan kelompok-kelompok yang

dalam jenayah-jenayah serious dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur sekarang berada di Indonesia. Sejumlah perwira tinggi militer dan polisi serta pemimpin-pemimpin militia masih aktif dalam operasi-operasi militer di Aceh dan di Papua Barat.

Angkatan Laut Indonesia sering dipandang sebagai lebih menghormati hak-hak asasi manusia daripada Angkatan Darat. Namun, kapal-kapal ALRI adalah merupakan bahagian yang integral daripada operasi militer besar-besaran Indonesia yang dengan sistematis telah menghancurkan Timor Timur dan memindahkan dengan paksa sepertiga penduduknya dalam tahun 1999. Pada bulan Juli 1998, anggota-anggota Angkatan Laut Indonesia membantai para penunjukrasa damai di Biak, Papua Barat, dan membuang mayat-mayat mereka ke laut. Kejahatan ini tidak pernah diselidiki oleh Pemerintah Indonesia. Pasukan Marinir ikut aktif dalam operasi-operasi militer di Aceh, dimana berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang serius telah terjadi.

Baru pertengahan September ini, kapal perang Indonesian mengancam dan mengejar sebuah motor boat pelancongan jauh di dalam kawasan perairan Timor Timur. Menteri Administrasi Dalam Negeri Timor Timur, Rogerio Lobato, berkata bahwa kapal-kapal perang Indonesia sering mencerooboh perairan negaranya. Bulan Desember yang lalu, sebuah kapal perang Indonesian memembak ke sebuah pulau yang dipertikaian di kawasan pantai Oecussi.

Dalam sebuah laporan yang dilampirkan dengan rancangan undang-undang itu, Komite Belanjawan Senat AS menyatakan "kemarahan dan kekecewaan dengan pembebasan petinggi-petinggi militer Indonesian dalam hubungan dengan kekejaman yang berlaku dalam tahun 1999 di Timor Timur dan cara-cara mahkamah ad-hoc hak asasi manusia yang dibentuk Indonesia itu melakukan tugasnya." Ia juga menyeru kepada State Department supaya "menggunakan

melaksanakan aksi tersebut yakni Penang Support Group for Aceh, Citizens International, Suara Rakyat Malaysia, Solidarity for Aceh, TERAS, Persatuan Ulama Pulau Pinang, Sahabat Alam Malaysia, HAKAM dan Aceh Refugee Centre

Aksi yang diliput beberapa media negara Malaysia itu berlangsung selama 2 jam lebih. Dalam siaran pers-nya peserta aksi meminta pemerintah Malaysia lebih aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian di Aceh. Pemerintah Malaysia juga diharapkan dapat mendesak Indonesia dan GAM untuk kembali ke perundingan.

Petisi untuk Aceh di Hanoi, Vietnam

Lebih 150 aktivis dari berbagai negara di Asia dan Eropa menandatangani petisi yang berisikan seruan agar penyelesaian konflik Aceh dengan pendekatan militer dihentikan. Mereka meminta konflik Aceh diselesaikan dengan pendekatan dialog damai dan demokratis. Mereka juga menilai kebijakan Indonesia menetapkan Aceh sebagai daerah darurat militer sejak tahun lalu telah menyebabkan ratusan warga sipil menjadi korban

Petisi yang ditandatangani pada 7 September lalu, diprakarsai beberapa aktivis Aceh yang ikut dalam pertemuan Asia Europe Forum (ASEM) di Hanoi, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, para peserta forum dari beberapa negara Asia dan Eropa, banyak membicarakan berbagai perang di belahan dunia, termasuk konflik di Aceh dan Papua. Pertemuan Hanoi itu sendiri berlangsung sejak 6-9 September 2004.

Raihana Diani, salah seorang peserta yang hadir dalam Forum ASEM itu kepada AcehKita.com mengatakan, sejumlah peserta menyatakan prihatin terhadap melarutnya konflik bersenjata di Aceh.

"Kita berharap peserta yang menandatangani petisi itu nantinya dapat mengampanyekan perdamaian di Aceh," terang Raihana yang juga Ketua Organisasi Perempuan Aceh Demokratik (Orpad) yang pernah 6 bulan mendekam dalam penjara Indonesia itu.

pengaruhnya atas Pemerintah Indonesia untuk memastikan organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan antara bangsa, media dan institusi-institusi hak-hak asasi manusia internasional diberikan akses yang tidak dihambat-hambat di Aceh. Laporan itu juga selanjutnya menyatakan keprihatinan tentang pembalakan liar secara besar-besaran yang dibiarkan dan bahkan digalakkan oleh pihak militer Indonesia.

Senat menyediakan \$22,000,000 bantuan ekonomi untuk Timor, lebih dari jumlah yang di minta oleh Pemerintah AS. Berkenaan dengan perbatasan wilayah perairan antara Australia dan Timor Timur, laporan Komite itu menyeru "agar ke dua belah pihak berunding dengan prasangka baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum antarabangsa".

70 organisasi AS dan internasional baru-baru ini menulis surat kepada Setia Usaha Negara Colin Powel menyatakan tentangan mereka bagi rancangan Pemerintah AS menyediakan bantuan FMF dan IMET kepada Indonesia, karena Indonesia belum lagi memenuhi syarat-syarat yang sudah dikenakan di masa lalu dan syarat-syarat baru yang sekarang sudah ditetapkan oleh Kongres.

Kampanye sekatan bantuan militer ini dipelopori oleh ETAN (East Timor Action Network) yang merupakan sebuah organisasi HAM internasional yang berpusat di AS yang menuntut demokrasi, keadilan dan hak-hak asasi manusia di Timor Timur dan di Indonesia. ETAN menuntut diadakannya sebuah mahkamah internasional untuk mengadili kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang berlaku di Timor Timur sejak 1975 dan supaya hambatan-hambatan bantuan militer AS untuk Indonesia diteruskan hingga Indonesia betul-betul melaksanakan reformasi atas angkatan bersenjatanya. Setelah East Timor berhasil merdeka dari Indonesia, ETAN mulai memperluas fokus advokasinya yakni Aceh dan Papua. (MND)

REFERENDUM SELF- DETERMINATION SEBAGAI KOMPROMI POLITIK RAKYAT ACHEH

Fikran Hariri

Mahasiswa Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia

Acheh, sebuah nama negeri di Kepulauan Melayu-Sumatera yang ucapannya cukup singkat bagi lidah kita tentunya, tetapi dia sekali lagi Aceh telah menyimpan banyak sejarah, pengalaman dan realiti yang sangat panjang serta beragam. Dari upaya-upaya pengintegrasian kerajaan-kerajaan yang kecil seperti, Peureulak, Pasai, Pedier, Gayo, Singkil dan lain-lain yang menjadi negara bahagian (Federal) pada masa kejayaannya yang sempat menguasai beberapa wilayah lain seperti semenanjung Melayu, Riau, Malaka, Jambi dan Palembang sebagai negara-negara konfederasi, namun di masa kemundurannya menjelang agresi Belanda yang kemudian menciptakan perang nasional Aceh yang paling lama dan penuh darah, hingga nasib yang sama masih dirasakan oleh generasi-generasi sekarang disebabkan praktek aneksasionisme, kolonialisme dan fasisme pemerintah RI. Aceh di bawah cengkeringan RI ini ternyata lebih berdarah-darah lagi dan membuat kita atau siapapun yang memiliki nurani kemanusiaan boleh tersayat-sayat.

Pergerakan Politik dan Aneksasi NBRI (Negara Baru Republik Indonesia) ke Aceh

Dari situasi konflik sosial-historis internal Aceh yang digambarkan itu, tentu merupakan suatu kesempatan emas bagi Soekarno, Cs untuk melakukan aneksasi negara baru RI mereka ke Aceh dahulunya. Terlebih lagi seorang putra Aceh Mr. Teuku Muhammad Hasan memang telah direkrut dengan sangat baik, ditambah lagi dengan proklamasi dan kemerdekaan RI sama sekali tidak mau diakui oleh kolonial Belanda karena tidak satupun wilayah RI yang diklaim Soekarno ada yang merdeka, minimal secara de facto. Tetapi situasi Aceh yang saat itu tetap merdeka dan memiliki

banyak modal adalah sesuatu yang sangat perlu dieksploitasi untuk membuat Belanda dan dunia internasional mengakui RI. Dari sejarah ini sudah boleh ditebak apa yang akan terjadi terhadap dan dialami Aceh selanjutnya.

Adalah sesuatu yang mengherankan apabila kemudian kita mengenang bagaimana proses sejarah aneksasinya terjadi, waktu NBRI (negara baru republik Indonesia) dimerdekakan, di Aceh belum dan bahkan tidak memberi-

kan dukungannya secara formal, legal dan kolektif, namun lembaga-lembaga pemerintah sipil RI dan beberapa organisasi yang bersifat kemiliteran bawah tanah dibentuk sebagai pola aneksasi awal di Aceh. Angkatan Pemuda Indonesia (API: mirip milisi pro integrasi dan kemudian menjadi cikal-bakal militer RI di Aceh) serta Komite Nasional Indonesia (KNI: sipil) adalah wujud daripadanya yang telah dibentuk langsung berdasarkan instruksi Jakarta dan Mr. Muhammad Hasan yang telah lebih dahulu dijadikan sebagai Gubernur Sumatera Utara oleh Jakarta, bukan berdasarkan inisiatif serta keinginan (Kesepakatan) kolektif rakyat Aceh. Sementara itu sekali lagi, PUSA pimpinan Tgk. Muhammad Daoed Beureueh yang memang sangat anti ulee balang dan

anti Belanda yang dinilai telah merusak Aceh juga berupaya menekan ulama-ulama lainnya dari kalangan tradisional yang terkesan tidak setuju dengan RI. Sehingga akhirnya dukungan yang mengatasnamakan ulama seluruh Aceh dikeluarkan sebagai fatwa yang dimaklumkan dan ditandatangani oleh empat orang ulama untuk mendukung RI Soekarno, Cs pada 15 Oktober 1945.

Dukungan ini dapat dipahami dan sampai sekarang menjadi pengetahuan umum (bukan rahasia umum) majoriti rakyat Aceh, adalah bukan dikarenakan oleh suatu latar belakang kesadaran, identiti dan entiti yang dibentuk atau didorong oleh faktor-faktor historis, politis, ideologis, sosiologis, antropologis, kultural dan geografis Aceh yang berkonsekwensi kepada perlunya pembentukan negara dan nasionalisme baru Indonesia. Jadi berbeza dengan sebuah kesadaran nasionalisme yang lazimnya selalu dengan sengaja membentuk sebuah negara dan bangsa, sebagaimana terjadi dalam perjuangan anti penjajahan dan keinginan penentuan nasib sendiri di dunia. Tetapi kebijakan politik baru Aceh yang tiba-tiba dilakukan oleh beberapa elit ini adalah konsekwensi dari konflik sosial-historis internal yang memanfaatkan situasi politik baru lainnya yang ada di luar. Sedangkan pihak luar (Jakarta) yang memang menguasai situasi politik baru ini juga lebih memanfaatkan kondisi sosial-historis internal Aceh, sebab Aceh adalah sesuatu yang sangat signifikan saat itu untuk kemerdekaan RI.

Sebaliknya dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan dan NBRI yang dimunculkan di pulau Jawa adalah berdasarkan faktor-faktor ideologis dan politis yang membentuk nasionalisme Indonesia sesuai dengan keinginan penafsirannya. Ini tentu boleh dipahami, sebab bagaimanapun, Soekarno yang saat itu sebagai presiden dan menilai dirinya sebagai pemimpin revolusi adalah orang Jawa asli. Serta pengalaman Jawa yang menikmami, melihat dan bekerjasama dengan kenyataan penjajahan Belanda selama 350 tahun, lalu tiba-tiba Belanda dikalahkan oleh Jepang dan kemudian Jepang dikalahkan oleh sekutu adalah sesuatu yang sangat melekatkan Jawa secara sadar dengan nasionalisme Indonesia menurut interpretasi serta aksinya, yang kemudian diimplimentasikan dalam praktek-praktek NBRI yang masih kita lihat sekarang.

Namun berbeza dengan apa yang terjadi di Aceh, kerana kenyataan bahawa kesadaran entiti dan identiti nasionalisme Indonesia sebagaimana dihembuskan oleh Soekarno Cs tidak dimiliki oleh rakyat Aceh, termasuk integrator-integrator Aceh ke dalam NBRI itu sendiri. Sementara di sisi lain kesadaran ke-Achhe-an sebagai sebuah bangsa tetap dijaga, bahkan tetap diimplimentasikan dalam praktek-praktek pemerintahan Aceh awal ketika sudah diklaim sebagai Indonesia. Tentu kondisi yang demikian adalah sesuatu yang sangat unik tetapi riskan, karena dengan cepat pasti menimbulkan konflik politik hebat di kemudian hari. sebelum NBRI diproklamirkan, Soekarno sendiri sudah menampakkan dirinya untuk menjadikan negara baru ini sebagai neo-kolonial fasis-rasis yang bercampur hegemoni kehidupan Jawa dan kerajaan kuno yang lebih feodal.

Sedangkan pihak luar (Jakarta) yang memang menguasai situasi politik baru ini juga lebih memanfaatkan kondisi sosial-historis internal Aceh, sebab Aceh adalah sesuatu yang sangat signifikan saat itu untuk kemerdekaan RI.



Apa yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah bahwa : "...Nasionalisme Staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri tegak di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan kini pula harus kita dirikan bersama-sama." Ternyata, Soekarno telah menunjukkan ambisinya yang sangat liar, hal mana menurutnya Indonesia adalah apa yang telah ada pada masa Sriwijaya dan Majapahit. Mungkin dia tidak mengetahui atau tidak mau mengetahui, bahwa Aceh tidak termasuk ke dalam kedua kerajaan itu. Tetapi kemudian dalam tindakannya Aceh dengan cepat telah dianeksasi. Lalu, bagaimana mungkin bahwa Soekarno boleh mengharapkan adanya nasionalisme Indonesia pada diri rakyat Aceh untuk menentukan masa depan NBRI bukannya, sementara Indonesia menurutnya adalah kedua kerajaan yang sangat berbeza dengan situasi Aceh. Tetapi sesuatu yang jelas adalah, di depan sebuah sidang, inti pidato Soekarno telah mengumumkan terang-terangan bahwa Indonesia adalah neo-kolonial yang penuh dengan hegemoni Jawa.

Kompromi politik rakyat Aceh

Kolonial Belanda tidak menunjukkan tanggungjawab politik serta moralnya untuk memperbaiki kondisi Aceh setelah dirusaknya. Bahkan, Belanda secara resmi turut menyerahkan kedaulatan Aceh kepada NBRI dalam Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949 di Den Haag. Hal ini memberikan konsekuensi politik kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk turut mengabaikan situasi-situasi Aceh yang tidak menentu, sehingga persoalan kedaulatan NBRI pun diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka dalam konferensi tersebut, yang di dalamnya ada wilayah Aceh sebagai NBRI yang memang dieksploitasi oleh Soekarno Cs. Padahal situasi Aceh yang masih memiliki persoalan yang sangat rumit yang ditinggalkan oleh para penjajah Belanda dan Jepang, serta kemudian muncul konflik antara pro negara Aceh merdeka dan pro proklamasi kemerdekaan NBRI itu sendiri hingga menjelang pengakuan NBRI oleh Belanda, masih perlu dipertanyakan kembali oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan negara baru itu sendiri dan kemudian pihak-pihak yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan-nya, khususnya kolonial Belanda dan PBB.

Bagaimana kita melihat dalam tiga tahun terakhir, perjuangan rakyat semakin meningkat kembali di Aceh, khususnya sejak sosialisasi solusi politik referendum self-determination. Hal mana majoriti rakyat Aceh lebih merasakan dan menyadari identitas, entiti dan karakternya sendiri yang berbeza dari bangsa-bangsa lain yang sekarang masih dipaksakan menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan-kehidupan entiti, identitas serta karakter yang dilatarbelakangi oleh kesadaran sosio-politik dan sosio-kultural, latar belakang historis, sosiologis, antropologis hingga kondisi geografis dan teritorial jelas sangat berbeza dari bangsa-bangsa lain. Kesadaran kolektif Aceh sebagai sebuah bangsa ini semakin tumbuh bangkit ketika melihat nasibnya yang sangat parah di bawah neo-kolonial NBRI yang pada kenyataannya memang diorganisir secara kejam dan dominan oleh bangsa lain.

Sangat wajar apabila rakyat Aceh telah merespon dan berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri melalui instrument hak penentuan nasib sendiri (Referendum) untuk menghilangkan neo-kolonialisme, seperti terlihat dalam pelbagai aksi dan simbol perjuangan hingga sampai saat sekarang. Rakyat Aceh lebih memperlihatkan wilayah dan masyarakatnya sebagai sebuah bangsa sendiri yang berbeza, dan RI dikonklusikan sebagai neo-kolonial fasis-rasis. Banyak elemen di Aceh selalu menilai dan mengatakan bahwa partisipasi sosio-politik kolektif Aceh yang menginginkan pelaksanaan referendum kemerdekaan dalam tiga tahun terakhir ini jauh berbeza dengan kondisi keinginan PUSA yang mendukung kemerdekaan RI yang dilatarbelakangi oleh konflik sosial-historis internal dan tidak diparticipasi oleh kolektif rakyat secara langsung. Dan Penilaian ini, tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan PUSA, yang diakui atau tidak telah berhasil beberapa saat memanfaatkan adanya kekalahan Jepang dan kemudian mendukung kemerdekaan RI, pada saat yang sama mempertahankan kondisi Aceh yang otonom sebagai strategi pertahanannya terhadap entiti, identitas dan karakter Aceh sebagai sebuah bangsa sendiri. Sehingga kemudian pada saat RI diakui oleh Belanda, pemimpin-pemimpin Aceh yang beorientasi PUSA sendiri



sebahagian ada yang menarik loyalitinya dari mendukung RI.

Ketidakterseriusan Tgk. Muhammad Daoed Beureueh untuk menyerah dan tunduk kepada RI secara sadar ini, telah membuktikan lagi dukungannya yang aktif terhadap perjuangan kemerdekaan yang menggunakan strategi baru (tanpa melakukan pengintegrasian, koalisi dan asosiasi) teritorial dan politik Aceh dengan negara lain, tetapi Aceh dijadikan sebagai negara merdeka yang utuh sebagaimana yang telah ada di masa lalu, sebelum diagresi oleh Belanda dan kemudian dianeksasi oleh NBRI. Negara Aceh yang merdeka ini diproklamkan kembali oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976 yang diorganisir lewat lembaga pemerintahannya ASNLF/GAM. Tetapi kemudian Tgk. Muhammad Daud Beureueh hanya mendukung GAM secara tertutup diakibatkan oleh bahwa Hasan Tiro tidak memanfaatkan sentiment Islam pada perjuangan kemerdekaan Aceh berstrategi baru ini; juga dikarenakan oleh bahwa pemerintah NBRI dan militernya sudah mengetahui langkahnya, sebagaimana pengamatan ahli politik. Sehingga kemudian pada 1978 Tgk. Muhammad Daud Beureueh secara paksa dia disergap dan diterangkan oleh militer NBRI ke Jakarta. Beginilah suatu kenyataan serta pergumulan politik Aceh yang sangat berliku-liku dan selalu tidak mungkin menghilangkan karakter, entiti, identitas dan keperluannya sebagai sebuah bangsa sendiri yang harus merdeka tanpa dominasi dan penjajahan pihak lain.

Rakyat Aceh lebih memperlihatkan wilayah dan masyarakatnya sebagai sebuah bangsa sendiri yang berbeza, dan RI dikonklusikan sebagai neo-kolonial fasis-rasis.

Lebih jauh penting untuk diketahui bahwa sejak kemerdekaan Indonesia diakui oleh kolonial Belanda, eksistensi NBRI sebagai neo-kolonial fasis-rasis tidak boleh disembunyikan dalam setiap karakter, kebijakan, sistem dan tindakan politiknya. Peleburan Aceh secara tiba-tiba pada 1950 ke propinsi Sumatera Utara hanyalah satu strategi pengepungan serta penguasaan teritorial. Kemudian tindakan lainnya diikuti oleh penghancuran kehidupan sosio-kultural, (termasuk melalui pemaksaan hegemoni budaya Jawa), eksploitasi kekayaan alam secara besar-besaran, serta pelbagai tindakan fasisme dalam mempertahankan aneksasinya melalui pelbagai operasi militer. Hasil-hasil penelitian baru tentang sejarah, budaya dan antropologi yang sangat tajam terhadap Indonesia, nasionalisme dan prakteknya, seperti apa yang dilakukan oleh Ichwan Azhari Staf Pengajar Program Studi Indonesia di Universitas

Humberg Jerman menyimpulkan bahwa: sampai sekarang penguasa Jawa yang mengendalikan Indonesia masih sahaja menginginkan luar Jawa sebagai daerah taklukkan. Sama seperti Gajah Mada, Majapahit dan jajarannya menginginkan jagad Nusantara berada dalam g e n g g a m a n mereka. Ternyata penguasa Jawa masih sahaja be-

Artikel 1 dari "Covenant on Civil and Political Rights and on Economic and Cultural Rights" mendeklarasikan bahwa semua bangsa dan rakyat mempunyai hak penentuan nasib sendiri. Lalu hal yang sama diperkuat lagi dengan lebih rinci oleh Majelis Umum PBB dalam "Declaration on The Granting of Independence to Colonial Peoples" pada klausa (Pasal) 2 dan 4, yang memfokuskan tentang hak kemerdekaan melalui penentuan nasib sendiri dan mendapatka status negara.

lum boleh atau tidak mau menangkap suasana batiniah orang-orang luar Jawa yang dari dulu sebenarnya tidak pernah mahu diperintah dan dikendalikan oleh "orang pintar" yang tidak pintar dan orang kuat dari sana.

Karena itu pertahanan entiti, identiti, karakter dan kepentingan nasional Aceh sebagai sebuah bangsa tidak akan boleh dihentikan. Munculnya GAM secara resmi, yang dipimpin Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro sejak tahun 1976, adalah suatu upaya bangsa Aceh dalam mempertahankan kedaulatan negaranya yang dilakukan sesuai menurut suatu kondisi politik internasional yang lumrah. Maka tidak diragukan, bahwa semua kenyataan baik yang bersifat diplomasi politik mahupun perjuangan melalui senjata yang masih berlangsung sampai saat ini, bukan hanya telah melestarikan suatu entiti, identiti, karakter dan keinginan suatu wilayah dan masyarakatnya sebagai sebuah bangsa sendiri, meskipun kedaulatan negaranya masih dicengkeram oleh pihak luar. Praktek-praktek sosio-politik Aceh yang demikian ini berarti telah mempertahankan Aceh pada posisi perjuangan nasionalnya untuk mendapatkan hak penentuan nasib sendiri dan status masa depan politiknya.

Mesti berkali-kali saya katakan bahwa kesadaan dan karakter terhadap entiti, identiti dan keperluan Aceh sebagai sebuah bangsa tidak pernah boleh diredam. Sebaliknya, justru penerapan-penerapan strategi militeristik, otoritesitik, sentralistik dan feodalistik semakin meyakinkan Aceh dan melihat nasibnya sebagai sebuah bangsa yang mesti menentukan masa depannya sendiri, termasuk melalui penggunaan kekuatan militer. Sebenarnya, bangsa-bangsa yang telah digabungkan secara sah pun ke dalam suatu

negara selalu berjuang menarik diri (secessionist) sebagai hak penentuan nasib sendiri yang diakui, apabila mengalami pelbagai penindasan serius dari pemerintah. Dan dalam negara yang telah dibentuk sama-sama dan saling menggabungkan diri secara sah misalnya, tanpa konsensus moral dan politik setiap keputusan bangsa majoriti yang ada di dalam negara tersebut sangat sering melahirkan serta melanjutkan tirani terhadap bangsa-bangsa minoriti yang telah diklaim sebagai bahagiannya. Bahkan, meskipun ada banyak negara yang mencoba mempertahankan keutuhannya melalui sistem federal seperti Nigeria, Malaysia, India, Tanzania, Canada dan negara-negara succesor (penyerahan dari penjajah) tidak boleh menghentikan keinginan bangsa-bangsa yang diklaim sebagai bahagiannya, sehingga sebahagiannya telah merdeka dan boleh mengatur diri dengan lebih baik dari sebelumnya seperti Singapore.

Apabila bangsa-bangsa yang dianeksasi, diinvasi, dijajah dan didominasi secara serius, maka perjuangan penentuan nasib sendiri menjadi sebagai sesuatu yang sangat serius pula. Sehingga kondisi kesadaran bangsa-bangsa tersebut yang ingin menentukan nasib sendiri, telah meningkat tajam dan menjadi permasalahan politik khusus sejak selama perang dunia pertama. Konsekwensinya pula hak penentuan nasib sendiri dipandang perlu direalisasikan dalam realiti politik sebagai hak masyarakat dunia yang merasakan dirinya sangat potensial sebagai bangsa. Bagi Aceh, keinginan penentuan nasib sendiri juga tidak jauh berbeza dari situasi adanya aneksasi, penjajahan dan dominasi baru yang fasis-rasis yang turut didorong oleh entiti, identiti dan karakter historis, politis, sosiologis, antropologis, geografis dan kepentingan Aceh sebagai sebuah bangsa. Sedangkan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa sungguh tidak sangat beradab memaksakan nasionalisme Indonesia terhadap bangsa Aceh, yang sekarang pada kenyataannya rakyat Aceh sama sekali tidak memiliki rasa nasionalisme Indonesia. Kita di sini boleh membayangkan, bagaimana solusi-solusi yang dikamuflekan dengan simbol-simbol Islam oleh Jakarta tidak boleh juga menundukkan Aceh untuk meredam perjuangannya, meskipun sebelumnya Snouck Hugronye telah melakukan strategi kultural-religius ini untuk mempermulus upaya kolonialisme Belanda terhadap Aceh.

Identiti dan instrument politik sendiri adalah sesuatu yang sangat signifikan bagi Aceh untuk membangun masa depannya secara bebas. Karenanya alasan paling simpel dan dapat dijawab oleh siapa sahaja adalah bahwa Aceh yang pada kenyataannya memiliki identiti, entiti dan karakter bangsa tersendiri memang perlu menentukan nasibnya sendiri daripada diatur oleh bangsa serta negara lain secara kolonialis, fasis dan tragis. Hukum internasional, salah satunya muncul untuk mengakui hak penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa dan rakyat-rakyat yang dijajah. Artikel 1 dari "Covenant on Civil and Political Rights and on Economic and Cultural Rights" mendeklarasikan bahwa semua bangsa dan rakyat mempunyai hak penentuan nasib sendiri. Lalu hal yang sama diperkuat lagi dengan lebih rinci oleh Majelis Umum PBB dalam "Declaration on The Granting of Independence to Colonial Peoples" pada klausa (Pasal) 2 dan 4, yang memfokuskan tentang hak kemerdekaan melalui penentuan nasib sendiri dan mendapatka status negara. Bahkan sejak piagam PBB ada, maksud hak penentuan nasib sendiri tidak dilepaskan dari hak rakyat dan bangsa yang ada dalam sebuah wilayah untuk menentukan status politik wilayahnya secara bebas dan jujur, apakah merdeka; atau berintegrasikan dengan suatu negara; atau melakukan asosiasi politik dengan negara lain. Cuma sahaja harus diakui bahwa setiap negara penjajah, fasis, rasis dan imperialis selalu menolak hak bangsa-bangsa yang ingin



menentukan nasib sendiri. Negara-negara ini paling getol mempertahankan klaimnya bahwa bangsa-bangsa yang dicengkeramnya adalah bahagian yang sah darinya.

Di samping itu beberapa aturan hukum yang diatur oleh internasional rupanya masih boleh sahaja dieksploitasi oleh negara-negara kolonialis, fasis, rasis, dominan dan imperialis untuk menghentikan perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa yang dijajah, diekskusi dan didominasinya. Misalnya, klausa 6 dari "Declaration on The Granting of Independence to Colonial Peoples" yang menyatakan bahwa: "Setiap usaha baik parsial maupun total untuk mengganggu kesatuan dan integritas nasional sebuah negara adalah tidak sesuai dengan piagam PBB." Karena pasal 1 (2) piagam PBB menghargai hak setiap negara anggotanya untuk tidak diintervensi, tetapi perlu saling menghargai berdasarkan hak persamaan dan hak penentuan nasib sendiri." Ini merupakan sebuah permasalahan ambivalensi yang sangat mendasar sebenarnya, karena boleh memelihara konflik secara sistimatis, serius dan kontinu di pelbagai penjuru dunia. Sekarang, di Asia Tenggara Aceh adalah salah satu wilayah yang mengalami kondisi demikian, meskipun bangsa Aceh telah memenangkan lebih 80 % kemerdekaan daerah-daerah secara de facto yang ditandai dengan kelumpuhan total administrasi Jakarta, pemerintah neo-kolonial masih mempertahankan klaimnya bahwa Aceh adalah bahagiannya. Sehingga eskalasi konflik bukan hanya terjadi pada tataran politik, tetapi konflik keamanan dan krisis kemanusiaan juga menjadi peristiwa yang sangat menegangkan dan kontinu. Konsekwensinya genocide, crimes agaisnt humanity dan war crimes dilakukan oleh kekuatan militer dan polis neo-kolonial RI terhadap sipil, aktivis, dan gerilyawan yang telah ditangkap.

Dalam situasi sekarang pembiaran terhadap konflik dan krisis tersebut adalah sesuatu yang sangat berbahaya terhadap eksistensi kebebasan, kemanusiaan, keadilan, demokrasi dan perdamaian. Padahal perlu diingat pada teori dan praktek hukum internasional yang sudah sering terjadi bahwa salah satu misi internasional, khususnya PBB adalah menciptakan kebebasan, kemanusiaan, keadilan, demokrasi dan perdamaian bagi tujuan kemanusiaan universal. Dan ini terdapat dalam majoriti aturan-aturan internasional, termasuk dalam hukum humaniter yang mengatur hukum dan politik perang antar negara, perang kemerdekaan nasional (self-determination) dan perang internal. Sedangkan benturan keinginan politik Aceh yang lestari sekarang dengan klaim Jakarta adalah suatu realiti yang sangat riskan bagi kebebasan, kemanusiaan, keadilan, demokrasi dan perdamaian. Bahkan diakui pula bahwa kebebasan, kemanusiaan, keadilan, demokrasi dan perdamaian akan tidak ada sama sekali dalam wilayah yang dijajah, ditindas, diekskusi, dan didominasi, kerananya pelaksanaan referendum penentuan nasib sendiri Aceh tidak boleh dinafikan sebagai upaya penegakan kebebasan,

kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, perdamaian, dan pencegahan konflik. Hal mana partisipasi kolektif untuk menentukan masa depan wilayah dan rakyatnya adalah sesuatu yang perlu diimplimentasikan dalam sebuah instrument yang damai dan jujur seperti referendum. Apalagi, hak penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa dan rakyat-rakyat bermakna hak kolektif masyarakat dalam proses-proses politik tertentu.



Di Quebec Canada, walaupun tidak ada eskalasi konflik bersenjata seperti di kawasan-kawasan lain di dunia, tetapi praktek referendum penentuan nasib sendiri untuk kemerdekaan sudah dua kali dilaksanakan dengan pemunculan alasan-alasan yang bersifat perbezaan karakter etnisitas, tetapi kelompok integrasi masih menang dalam persentase yang sangat tipis. Dan ini adalah konsekwensi demokrasi yang harus siap diterima oleh para pelakunya. Kehancuran Uni Soviet dan pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa yang sebelumnya selalu diklaim sebagai bahagian sah darinya, adalah bahagian yang tidak boleh dilepaskan dari proses dekolonisasi dan penghilangan dominasi asing. Bahkan banyak bangsa yang sebelumnya diklaim sebagai bahagian suatu negara, lalu

berkonflik puluhan tahun dan aktiv mempromosikan karakternya sebagai sebuah bangsa yang dijajah, didominasi, disubordinasi dan didiskriminasi telah mengalami kenyataan adanya pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri.

Karenanya hak penentuan nasib sendiri yang diinginkan oleh suatu bangsa dan rakyat adalah pernyataan masyarakat interna-sional untuk menghilangkan ketidakadilan sosial yang terjadi di bawah praktek-praktek kolonialis-me, dominasi, aneksasionisme, fasisme, imperialisme dan diskriminasi. Sekarang Aceh yang dikelola oleh RI pada kenyataannya tidak boleh dilepaskan dari kondisi menyedihkan ini. Maka moralitas internasional yang anti kolonialisme atau neo-kolonialisme, dominasi, aneksa-sionisme, fasisme, imperialisme dan diskriminasi perlu melibatkan diri secara aktif untuk mempermulus keberhasilan penentuan nasib sendiri bagi Aceh saat ini. Sekaligus, sekali lagi bahwa praktek hak penentuan nasib sendiri melalui instrument yang demokratis melalui referendum atau jajak pendapat adalah sesuatu yang urgent terhadap proteksi kemanusiaan, kebebasan, keadilan dan pemberdayaan Aceh masa depan. Terlebih lagi dalam situasi eskalasi konflik yang sudah melibatkan peperangan perjuangan nasional penentuan nasib sendiri Aceh dan partisipasi kolektif sipil, serta harus berhadapan dengan neo-kolonialisme fasis-rasis RI di sisi lain, adalah sesuatu yang sangat ideal untuk dipraktekkan. Misi internasional untuk penentuan nasib sendiri Aceh dalam rangka menegakkan perdamaian, kemanusiaan, kebebasan, keadilan dan pemberdayaan Aceh sudah sangat memenuhi syarat untuk dilakukan.

TEUNGKU ISHAK DAUD DALAM KENANGAN

dari seorang aktivis kemerdekaan Aceh yang saat ini menetap di pulau Jawa
(lpcsmh@yahoo.com)

Pada 8 September 2004 lalu bangsa Aceh telah kehilangan lagi seorang pejuangnya dia adalah Panglima TNA wilayah Peureulak Teungku Ishak Daud, yang selama puluhan tahun telah mengorbankan usianya dalam hari-hari yang berat di hutan-hutan Aceh selama hidupnya demi tujuan mulia yaitu kebebasan, kedaulatan dan kehormatan Bangsa Aceh. Sekali lagi bangsa Aceh kembali berduka. Sekali lagi kalimat "Inna lillahi wa inna ilaihi Rajiun" yang sudah mewarnai hari-hari di Aceh, kembali kita ucapkan.

Satu demi satu pemimpin perjuangan Aceh telah pergi meninggalkan kita semua. Seharusnya ini menjadi perenungan kita bersama. Tahun demi tahun perjuangan bangsa Aceh demi memperjuangkan kemerdekaannya diisi dengan berbagai pengorbanan yang tidak sedikit. Harta benda dan nyawa tidak terhitung banyaknya, akan tetapi seperti yang kita lihat saat ini, sungai darah dan air mata masih mengalir dengan derasnya di Aceh.

Dengan kondisi seperti saat ini maka kita dapat melihat bahwa masa depan Aceh masih jauh dari kejayaan dan kegemilangan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kondisi terakhir di Aceh adalah situasi terburuk sepanjang masa perjuangan rakyat Aceh dimana sebagian besar rakyat Aceh dihinggapi penyakit apatisisme akut akan perjuangan kemerdekaan rakyat Aceh, berkomplikasi dengan oportunisme dan hedonisme yang kronis.

Hal itu belum seberapa jika ditambah dengan (lagi-lagi) mengharapkan orang lain untuk memperbaiki keadaan Aceh (SHIT!) dengan ikut berpartisipasi dalam suksesi pemerintahan orang lain, yang jangankan menepati janjinya untuk Aceh, janji terhadap rakyatnya sendiri pun dikhianati. Perlu kita catat kalau yang mengetahui akar persoalan Aceh adalah orang Aceh sendiri. Bukan mereka yang setiap hari selama puluhan tahun merampok kekayaan kita dan mengkorupsi harta kita. Bukan mereka yang setiap saat menyempal suara kita dengan senjata dan janji-janji manis tanpa bukti. Bukan mereka yang membatasi hutan kita dengan proyek Ladia Galaska dengan mengatasnamakan warga terisolir. Jadi hanya kita yang bisa menyelesaikan masalah Aceh, sekali lagi Bukan Mereka!

Sebagian besar pemuda-pemuda Aceh yang diharapkan untuk meneruskan perjuangan Aceh telah pergi meninggalkan tanah Aceh, sebagian meneruskan perjuangan di tempat lain, sebagian menuntut ilmu, sebagian besar menyelamatkan diri dari rasa takut akan maut, teror, dan tuntutan perut, yang tidak bisa di tawar yang kian menekan dari hari ke hari. Yang paling ironis adalah kelompok terakhirlah yang mendominasi.

Saya pribadi tidak tahu apa yang ada di benak mereka. Namun saya nilai ada semacam dualisme sikap, enggan terlibat bahkan tidak mendukung organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh akan tetapi sepakat jika Aceh menjadi negeri yang merdeka. Sikap ini bukanlah bentuk penghargaan terhadap mereka yang sudah meninggalkan kita. Sedih, kesal, marah mungkin itulah yang Alm. Teungku Abdullah Syafei, Teungku Ishak Daud dkk. rasakan di peristirahatan terakhirnya.

Saya iri sekaligus malu bila melihat medan-medan perjuangan yang lain dimana pada tahun 1941 hampir setiap orang tua dari anak-anak Jerman yang berada di perantaraan berkata "Ras Aria sejati harus kembali ke tanah kelahirannya" pada masa itu Jerman sedang dalam pertempuran habis-habisan dengan tentara Sekutu demi mempertahankan "Keunggulan" bangsa Jerman. Tahun 1945 bangsa Yahudi di seluruh dunia kembali ke tanah yang mereka klaim sebagai "tanah yang dijanjikan" Palestina dengan resiko menghadapi serbuan negara-negara Arab dan terbukti 1967 mereka harus menghadapi "keroyokan" enam negara Arab sekaligus. Namun dengan keyakinan religius yang kuat ditambah kecerdasan intelektual mereka dapat memenangkan pertempuran tersebut. Tahun 1958 Fidel Castro memimpin perantaraan Kuba di AS kembali ke Kuba untuk meruntuhkan rezim militer Fulgencio Batista yang telah menindas rakyat Kuba, walaupun sebelumnya dia gagal dan dipenjara. Pada pertengahan dekade 90-an perantaraan Muslim Kosovo yang sebagian besar sukses di Eropa dan Amerika bersedia meninggalkan kesuksesannya hanya untuk mengangkat senjata melawan tentara Serbia yang melakukan genosida terhadap muslim Albania. Yang terbaru adalah Di Irak, menjelang invasi AS ke Irak tahun 2003 stasiun televisi satelit Al Jazeera menampilkan wawancara dengan warga Irak perantaraan yang mengejutkan —Bahkan!— seorang supir taksi Irak yang bekerja di Yordania pulang ke Irak dengan taksinya dan berbekal sepucuk senapan AK 47, "hanya" untuk melawan pasukan AS yang akan menginvasi Irak dan yang membuat saya kagum menjelang masa invasi tersebut kalau boleh saya bilang tidak ada rakyat Irak yang mengungsi meninggalkan Irak. Mereka bertahan! Walaupun mereka menghadapi resiko kematian sebagai harga yang harus mereka bayar demi kebebasan Irak.

Setelah bertualang ke negeri lain mari kita kembali ke Aceh. Bagaimana dengan Aceh? —Tanpa meragukan semangat heroik dari bangsa Aceh—Yang terjadi di negeri ini adalah sebaliknya, ketika pada masa-masa genting menjelang Darurat Militer (baca: agresi) I diberlakukan di Aceh oleh rezim NKRI dengan mengirim puluhan ribu pasukan TNI (baca: pasukan pendudukan), ketika maut mulai menyebar terornya di Aceh justru sebagian Rakyat Aceh malah pergi meninggalkan negeri mereka. Hanya sedikit dari mereka yang berjuang, bertahan di Aceh dan Ishak Daud adalah salah seorang yang sedikit itu yang tetap setia di tengah-tengah rakyat Aceh hingga akhir hayatnya! Lalu apa kita bilang? "memang beliau hebat", "Masya Allah"? Ribuan Doa, pujian, air mata rakyat Aceh sekaligus cacik maki, pesta pora kenaikan pangkat serdadu musuh yang berhasil membunuhnya, mengiringi kepergian Ishak Daud. Tidak perlu lagi kita pertanyakan mengapa TNI begitu, akan tetapi bagi orang Aceh, bagi mereka yang memujinya dan menangisinya Berhentilah! Karena saya sangat yakin bahwa orang-orang seperti Ishak Daud tidak membutuhkan sampah-sampah

pujian dan ember-ember air mata yang justru memberatkan kepergian mereka. Bukan untuk itu mereka berjuang. Yang mereka butuhkan adalah jaminan bahwa ada orang-orang Aceh yang berani kembali melanjutkan perjuangan mereka yang belum selesai.

Sanggupkah kita menjamin itu? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, karena atas dasar pertanyaan tersebutlah saya menulis perenungan ini sekaligus kritik pribadi buat diri saya sendiri yang belum pernah kembali ke Aceh. Saya pikir itu adalah pertanyaan buat diri kita yang mengklaim diri sebagai "Orang Aceh".

Kawan, perlu diketahui bahwa keberadaan kita sangat dibutuhkan oleh rakyat Aceh. Saya pernah mendengar kisah dari seorang kawan wartawan dari majalah Aceh Kita yang bertemu sewaktu mengikuti pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh LSM ISAI di Puncak, Bogor. Ketika pada masa DM I dia berkunjung ke suatu desa di Aceh untuk meliput berita dia mendapat suatu kalimat pertanyaan dari seorang ibu tua "mengapa mereka meninggalkan kita?" pertanyaan itu ditujukan buat para aktivis Aceh yang menjelang DM beramai-ramai meninggalkan Aceh. Kawan saya terkesima dan terharu ia tidak berusaha memberi jawaban apapun karena ia sadar seandainya ia adalah ibu tua itu ia tetap tidak bisa menerima alasan yang kita anggap rasional sekalipun.

Tidaklah pertanyaan itu mengusik nurani kita? Tidaklah pertanyaan itu menimbulkan rasa malu pada mereka yang berlabel "Aktivis"? dalam situasi yang serba sulit saat ini rakyat Aceh membutuhkan pendamping, mereka butuh orang-orang yang setia menemani mereka. Bahkan mungkin bagi mereka kita tidak perlu melakukan apapun asal mereka tahu bahwa kita "ada" di Aceh sekalipun kita bersembunyi didalam gua di tengah hutan, seperti halnya TNA. Bahwa adanya kita di Aceh menimbulkan semangat juang yang tinggi bagi rakyat Aceh. Aktivis sebenarnya tidak perlu takut akan kekurangan orang yang berjuang untuk Aceh karena penangkapan, penculikan dan pembunuhan. Ini telah dibuktikan oleh TNA yang telah kehilangan ribuan personilnya dalam perang 28 tahun dengan RI. Hingga kini TNA tetap eksis bahkan bertambah maju. Che Guevara dalam puisinya menulis "Setiap tetesan darah dari mereka yang berjuang untuk bendera yang bukan tempat ia dilahirkan akan menjadi semangat bagi mereka berjuang demi kebebasan negaranya". Puisi ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya yang berjuang untuk Kuba walaupun dia adalah orang Argentina. Jika orang asing yang berjuang untuk rakyat negara lain dapat menjadi contoh, sedahsyat apa efeknya bagi rakyat jika orang asli suatu negeri yang berjuang dan kemudian mati? Pertanyaan itu dapat kita jawab sendiri.

Kembali Ke Aceh Berjuang Dengan Caramu!

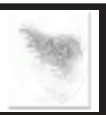
Tidak mesti bagi setiap orang Aceh melakukan perjuangan bersenjata dan politik, yang mesti kita sadari banyak potensi yang belum kita olah di Aceh. Masih banyak sektor potensial yang belum kita gali. Potensi-potensi ini memerlukan orang-orang Aceh yang ahli untuk diolah. Janganlah kita contoh orang Afghanistan yang sibuk berperang dengan sesamanya hingga pada akhirnya potensi minyak bumi Afghanistan diolah Amerika Serikat. Kalau sudah begitu siapa yang memperoleh keuntungan?. Orang Afghanistan kini masih memikirkan diganjil dengan apa perut mereka besok?.

Terlepas dari perasaan subjektif kita terhadap Yahudi kita perlu mencontoh mereka yang berhasil mengolah gurun pasir jadi tanah yang subur dan hijau, berlandaskan keyakinan religius mereka bahwa Yahweh akan menolong bangsa Yahudi. Bangsa Aceh adalah bangsa Islam. Bangsa yang melakukan sesuatu berlandaskan keyakinan religius. Kita mengalahkan Portugis dengan kalimat tauhid "Laa illa ha ilallah". Kita mengalahkan Belanda dengan keyakinan kita pada Allah bahwa Allah akan menolong kaum muslimin dari pada *kaphe* Belanda. Atas dasar keyakinan religiuslah Teungku Cik Di Tiro melakukan perang Sabi. Kalau Yahudi bisa mengapa kita tidak?

Sekedar referensi kalau seorang Marxis Argentina bernama Ernesto "Che" Guevara rela menghabiskan sepanjang hidupnya, mengorbankan kemapanan yang bisa diraih dari gelar dokternya dan warisan kekayaan orang tuanya yang masih bangsawan Spanyol demi perjuangan pembebasan yang tak kenal kata henti dan tidak mengenal tapal batas negara demi Kuba, Kongo, Bolivia, sampai akhir hidupnya yang berakhir tragis di eksekusi oleh regu tempak pasukan pemerintah Bolivia. Adakah alasan bagi orang Aceh tidak bisa melakukannya untuk Aceh sendiri? Kalau seorang komunis ortodok Fidel Castro dalam pledoinya dihadapan pengadilan rezim militer Batista bisa berkata dengan penuh keyakinan "Sejarah akan membebaskan saya" Seharusnya bangsa Aceh dengan keyakinan yang tinggi mengatakan bahwa Sejarah Akan membebaskan Aceh! Meminjau istilah Che " Puerta o Muera, Venceremos! yang artinya Negara Kita atau Kematian, Kita Dapat Melakukannya! Tentu kita juga tidak lupa dengan Imam Khomeini, bahwa beliau juga mengatakan "Menyerah pada penindasan adalah lebih kejam daripada penindasan itu sendiri". Seorang Jamaika bernama Bob Marley mengatakan dalam lagunya "Get up, stand up! Stand Up For Your Rights".

Lalu apa lagi yang kita tunggu? Nothing Can Stop Us.

Selamat Jalan Teungku!



Pengalaman Bersama Munir oleh Viktor Milo

DIA PERGI MEMBAWA KALAH SELINTAS TENTANG PERJUANGAN MUNIR,SH

Hari itu sedikit berawan, tidak seperti biasanya. Mahasiswa mondar mandir di Jalan As-Sumatrani Darussalam Banda Aceh, jalan yang menghubungkan Universitas Syiah Kuala dengan IAIN Ar-Raniry. Di sebuah rumah, terlihat banyak mahasiswa sedang berkumpul. Mereka baru pulang dari kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh mengikuti sidang Raihana Diani yang dituduh menghina Presiden Megawati Sukarno Putri dan Hamzah Haz.

Daihatsu Taruna warna silver berlahan masuk ke rumah tersebut. Di *baloe* rumah itu sedang berlangsungnya diskusi tentang penyelidikan HAM dan Monitoring CoHA. Dari mobil milik LBH Banda Aceh itu turun Munir SH. Cak Munir - begitulah panggilan akrab terhadap aktivis HAM yang sangat getol memperjuangkan kasus pelanggaran HAM di Aceh tersebut-petang itu sangat gembira. Dengan kumis berwarna tembaga dan setelan kemeja lengan panjang warna merah hati ia melangkah naik keatas *baloe* sambil tersenyum penuh kemenangan. Iapun mulai bertutur tentang pengalamannya - menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh LBH Banda Aceh - di pengadilan barusan.

"Apakah Anda mengenal photo ini" Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukkan gambar Megawati yang sudah di silang dengan sprej berwarna merah,"Kenal" jawab Munir. "Siapa?"

"Ketua PDIP dan Ketua PPP" jawab Munir sambil tangannya menunjuk photo Hamzah Haz di tangan kiri JPU. Muka hakim merah padam.

JPU menanyakan berapa kali Munir pergi ke Aceh, "Sembilan kali" jawab Munir tegas. "Bagaimana anda dapat mengatakan ahli tentang Aceh" Dengan nada sinis dan mengejek JPU menanyakan keberanian Munir mengklain dirinya sebagai ahli tentang Aceh. Munir bukan menjawab pertanyaan itu, tetapi malah balik bertanya pada JPU, "Anda kenal unta?".

Tahu pertanyaannya tidak akan dijawab, Munir melanjutkan : "Unta itu lahir di Arab, nenek moyangnya tinggal di sekitar ka'bah dan hidup serta besarnya di tempat itu. Coba anda hadirkan unta ketempat ini, lalu tanyakan pada unta bagaimana bentuk ka'bah. Pasti unta tidak dapat menceritakan.

Anda tahu, mengapa?

"Karena unta tidak punya akal dan tidak bisa berfikir, tapi saya punya akal dan dapat membaca. Jadi perlu anda ketahui mengetahui sesuatu tidak mesti lama berada di tempat itu."

Tanggal 22 Juni 1999, Munir, SH sebagai Koordinator Badan Pekerja KontraS bertempat di Kantor YLBHI Jakarta, menjelaskan akan mengirimkan profil kekerasan TNI di Aceh kepada Lembaga-lembaga Internasional di Bawah PBB. KontraS akan membawa kasus pelanggaran di Aceh ke sidang Sub Komisi Tinggi HAM PBB di Geneva serta akan secara rutin mengirimkan laporan kepada lembaga seperti Human Right Watch (HRW) dan Amnesty Internasional. Keseriusan Munir mendapat dukungan dari Markas Besar GAM di Stockholm melalui siaran pers dengan tanggal 29 Juni 1999. Seluruh Jajaran Aceh Merdeka dengan unsur sipil dan militer di minta untuk membantu Munir mendapat data-data untuk kepentingan tersebut. Niat pemuda keturunan Arab tersebut akhirnya tercapai. Pada Bulan Agustus 1999 dan Maret - April 2000, KontraS mengirimkan Delegasinya dalam sidang Komisi dan Sub Komisi Tinggi HAM PBB di Geneva untuk memaparkan kekejaman TNI di Aceh.

Perjuangan Munir untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia tidak hanya sampai disitu. Setelah membantu Komisi Orang Hilang

Nama : Munir, SH
Lahir :
Malang Jawa Timur, 8 Desember
1965
Meninggal : 7 September 2004.
Agama : Islam
Istri : Suciwati
Anak :
Sultan Alif Allende (12 Oktober 1998
dan Diva (2)
Ibu : Nyonya Jamilah

Jabatan Terakhir :
Directur Eksekutif Lembaga
Pemantau Hak Asasi Manusia
Indonesia (IMPARSIAL)

Pendidikan :
Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Malang 1990

Karier :
Karyawan Perusahaan penyewaan
sound system dan penjualan alat
elektronik

Sukarelawan LBH Surabaya Pos
Malang (1991)
Ketua LBH Surabaya Pos Malang
(1991)
Koordinator Divisi Buruh dan Divisi
Hak Sipil Politik LBH Surabaya
(1992-1993)
Kepala Bidang Operasional LBH
Surabaya (1993-1995)
Direktur LBH Semarang (1996)
Sekretaris Bidang Operasional
YLBHI (1996)
Wakil Ketua Bidang Operasional
YLBHI (1997)
Wakil Ketua Dewan Pengurus YLBHI
(1998)
Koordinator Badan Pekerja KontraS
(16 April 1998 -2001)
Ketua Dewan Pengurus KontraS
(2001)
Directur Eksekutif Imparsial (2004)

Organisasi
Sekretaris Al-Irsyad Kabupaten
Malang (1988)
Sekretaris Badan Mahasiswa FH
Universitas Brawijaya (1989)
Ketua Senat Mahasiswa FH
Universitas Brawijaya (1989)
Anggota HMI
Divisi Legal Komite Solidaritas untuk
Marsinah
Sekretaris Tim Pencari Fakta Forum
Indonesia Damai

Penghargaan
Satu orang dari 20 Orang Pemimpin
politik muda Asia pada Milenium
baru oleh Majalah Asia Week
(oktober 199)
Right Livelihood Award di Swedia
(Pengabdian terhadap HAM dan
Kontrol terhadap militer di Indonesia
(8 Desember 2000)
Man of The Years versi Majalah
Ummat (1998)

Alamat Rumah:
Jln. Cendana XII No. 12
Jakasampurna Permai, Bekasi Barat

dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Aceh bersama dengan Koalisi NGO HAM, Forum LSM Aceh, LBH Banda Aceh, Flower Aceh, Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), Suloh Aceh dan Yayasan Anak Bangsa (YAB), Walhi Aceh, pada tahun 1998. Seterusnya membentuk Ikatan Orang Hilang (IKOHI) dan pada tahun 2001 membentuk Imparsial bersama aktivis HAM di Jakarta.

Kini Pria kelahiran 8 Desember 1965 tersebut sudah pergi untuk selamanya. Almarhum meninggalkan tugas kemanusiaan yang belum sampai keujung. Kematiannya dalam usia yang sangat muda - 38 tahun - dan dianggap sedikit misteri.

Pada tanggal 6 September 2004, Istri dan anaknya melepaskan Munir melanjutkan program master (S2) di Universitas Utrecht, Amsterdam - Belanda. Ternyata pertemuan itu adalah yang terakhir bagi keluarga aktifis itu. Penerima penghargaan **The Right Livelihood Award** di Swedia tahun 2000 tersebut diketahui meninggal dua jam sebelum mendarat di Bandara Internasional Scipol Amsterdam.

Kenangan yang ditinggalkannya sungguh indah dan mengerikan. "Musuh kita terlalu kuat, mereka punya dana besar dan struktur yang sangat kuat. Untuk menghadapi mereka kita perlu disiplin yang tinggi dan juga kesabaran yang cukup" begitulah suatu kata-kata yang masih terngiang dalam ingatan penulis ketika penulis tinggal bersamanya di Plumpung Jati Negara.

"Kehidupan seperti ini bukanlah cita-cita kecil saya, tetapi struktur penindasan yang telah mengakar di dalam masyarakat akhirnya menggiring saya untuk hidup seperti ini", kata almarhum menanggapi peristiwa bom yang meledak didepan rumahnya.

Dari peledakan bom di depan rumahnya, bom kantor KontraS Jakarta, penyerangan terhadap kantornya sampai dengan pembantaian terhadap anggota KontraS di Timor Timur dihadapinya dengan tenang dan tetap berpikir strategis.

Apa rahasianya?

Suciwati itu jawabannya. Seorang aktivis buruh yang terlibat perjuangan membelah hak buruh bersama Marsinah - adalah seorang perempuan tegar yang dinikahi Munir dan memberi dukungan yang kuat bagi perjuangannya. Suciwati kini tinggal bersama Sultan Alif Allende (5) dan Diva (2) anak yang ditinggalkan almarhum untuk melanjutkan perjuangan ayahnya.

Sang 'pahlawan orang hilang' itu pergi dengan membawa kekalahan, Aktifis PRD yang di culik oleh **'Tim Mawar'** Kopassus belum habis di bongkarnya. Ribuan orang hilang terus bertambah di Aceh, Papua, Ambon dan ditempat lain di Negeri penjajah itu. Kekerasan itu tidak akan berhenti selama militer mendapat tempat yang baik di Indonesia. Dengan sedikit nakal saya bertanya padanya: "Cak, apa mungkin militer dapat dipreteli

dan akan ikhlas menerima demokrasi, yang berisiko terhadap pengadilan terhadap dirinya?" Sambil mengeleng kepalanya sang pejuang itu menarik nafas dalam-dalam.

Letnan Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono telah terpilih sebagai Presiden. Artinya militer sudah kembali memegang tampuk tertinggi kekuasaan di Indonesia. Mungkin kalau jasat Munir dapat berbicara, maka dia akan berpesan "Kawan!! perjuangan kita belum selesai"



BIOGRAFI MERDEKA

Wiratmadinata

Kembang taman yang kita semai
bersama
takkan tumbuh tanpa diberi ruang
dan udara merdeka

Nyanyian-nyanyian kita juga
Akan tinggal nada, tanpa diberi
kepastian
untuk menjadi suara

Impian-impian kita pun
menuntut ruangnya sendiri
untuk membungai setiap tidur kita

Aku senantiasa mencoba memastikan
detak nafas dan jantung kita
adalah hidup yang menemui hakekatnya

Kembang setaman, impian-impian,
dan nafas kita
hanyalah catatan beku dan tua
karena lama ia terpenjara

*Wahai langit dan angkasa yang terbuka
berikan aku satu semangat saja
menantang sang garuda*

Acheh 1999

